



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

PEMBIMBING

Lina Favourita Sutiaputri Ph.D

Fachry Arsyad M. Kesos

Oleh :

Muhammad Dzaky Luthfan

NRP. 20.03.029

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzaky Luthfan

NRP : 20.03.029

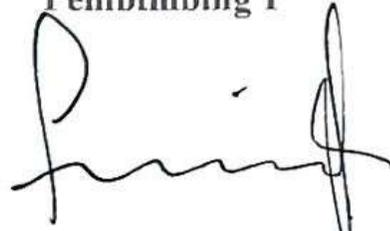
Program : Program Studi Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial

Pembimbing 2



Fachry Arsyad M. Kesos

Pembimbing 1



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

Mengetahui :

Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktikum Laboratorium dan penulisan laporan akhir Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Laporan Praktikum Laboratorium disusun berdasarkan dari hasil kegiatan analisis yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari – 19 April 2023 dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Praktikan melaksanakan kegiatan Praktikum Laboratorium di Kelurahan Ranca Bolang Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Tentunya Praktikan tidak dapat menyelesaikannya laporan ini tanpa dibantu dan di dukung oleh berbagai pihak. Maka dari itu, praktikan ingin mengucapkan terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
4. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku dosen pembimbing satu dan Fachry Arysad M. Kesos selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan baik secara keilmuan, pengetahuan, administrasi, dan dukungan dalam proses pelaksanaan praktikum;
5. Pematari dalam pembekalan profil lulusan yang telah memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai setiap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
6. Teman-teman kelompok 8 Praktikum Laboratorium yang telah bekerjasama dan saling mendukung selama kegiatan Praktikum Laboratorium berlangsung;
7. Orang tua dan keluarga atas dukungan dan doa untuk kesuksesan praktikan selama Praktikum Laboratorium.

Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurna, oleh karena itu praktikan mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun terhadap laporan Praktikum Laboratorium

Bandung, 17 April

Praktikan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	2
1. Tujuan Praktikum.....	2
2. Manfaat Praktikum.....	2
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	3
D. Proses Praktikum.....	4
E. Sistematika Laporan.....	10
BAB II.....	11
PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	11
A. Profil Analisis Jaminan Sosial.....	11
1. Gambaran Umum Masalah.....	11
2. Tinjauan Konsep.....	12
3. Asesmen	16
4) Rencana Intervensi	19
B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	25
1. Gambaran Umum Masalah.....	25
2. Tinjauan Konsep	26
3. Asesmen	30
4. Rencana Intervensi	32
C. Analisis Pemberdayaan Sosial.....	39
1. Gambaran Umum Masalah.....	39

2.	Tinjauan Konsep.....	40
3.	Asesmen	42
4.	Rencana Intervensi	44
D.	Analisis Penataan Lingkungan Sosial	51
1.	Gambaran Umum Masalah.....	51
2.	Tinjauan Konsep.....	52
3.	Asesmen	53
4.	Rencana Intervensi	56
E.	Analisis Penanggulangan Bencana	63
1.	Gambaran Umum Masalah.....	63
2.	Tinjauan Konsep.....	64
3.	Aesemen	66
4.	Rencana Intervensi	68
	MATRIKS PROFIL	75
	BAB III	77
	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Rekomendasi	78
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sistem Partisipan Jaminan Sosial.....	20
Tabel 2. Rencana Anggaran dan Biaya Jaminan Sosial	21
Tabel 3. Analisis SWOT Jaminan Sosial	22
Tabel 4. Jadwal dan Langkah Jaminan Sosial.....	24
Tabel 5. Sistem Partisipan Sumber Dana Bantuan Sosial	34
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya Sumber Dana Bantuan Sosial.....	35
Tabel 7. Analisis SWOT Sumber Dana Bantuan Sosial	36
Tabel 8. Jadwal dan Langkah Sumber Dana Bantuan Sosial.....	38
Tabel 9. Sistem Partisipan Pemberdayaan Sosial.....	45
Tabel 10. Rancangan Anggaran Biaya Pemberdayaan Sosial	47
Tabel 11. Analisis SWOT Pemberdayaan Sosial	48
Tabel 12. Jadwal dan Langkah Analisis Pemberdayaan Sosial	50
Tabel 13. Sistem Partisipan Analisis Penataan Lingkungan Sosial	57
Tabel 14. Rancangan Anggaran Biaya Analisis Penataan Lingkungan Sosial	59
Tabel 15. Analisis Kelayakan Program Analisis Penataan Lingkungan Sosial	60
Tabel 16. Jadwal dan Langkah Analisis Penataan Lingkungan Sosial	62
Tabel 17. Sistem Partisipan Penanggulangan Bencana	69
Tabel 18. Rancangan dan Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana.....	71
Tabel 19. Analisis Kelayakan Program Penanggulangan Bencana	72
Tabel 20. Jadwal dan Langkah Analisis Penanggulangan Bencana	74
Tabel 21. Matriks Profil	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Pohon Masalah Jaminan Sosial.....	17
Gambar 2. Pohon Masalah Sumber dana bantuan sosial	31
Gambar 3. Pohon Masalah Pemberdayaan Sosial.....	43
Gambar 4. Pohon Masalah Penataan Lingkungan Sosial	54
Gambar 5. Pohon Masalah Penanggulangan Bencana.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Resume Pembekalan Profil Jaminan Sosial	80
Lampiran 2. Resume Pembekalan Profil Sumber Dana Bantuan Sosial.....	83
Lampiran 3. Resume Profil Pemberdayaan Sosial	85
Lampiran 4. Resume Profil Penataan Lingkungan Sosial.....	87
Lampiran 5. Resume Profil Penanggulangan Bencana	89
Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan	91

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (classroom teaching), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (laboratory practicum) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, namun dikarenakan masih pandemi covid maka kegiatan praktikum lapangan dilakukan secara luring dengan meminta data mengenai permasalahan sosial yang ada di tempat tinggal setempat dan secara daring dengan analisis data sekunder terkait fenomena permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri.
- b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang telah dipelajari.
- c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 1. Pendekatan Awal
 2. Asesmen
 3. Perencanaan Intervensi

2. Manfaat Praktikum

Bagi Mahasiswa :

- a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerja sama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri.

- b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- f. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - 1. Pendekatan awal
 - 2. Asesmen
 - 3. Perencanaan Intervensi
 - 4. Intervensi
 - 5. Evaluasi, rujukan, dan terminasi

Bagi Lembaga :

- a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi praktikum di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

- 1. Pra lapangan :
 - a) Pembekalan : 25 Januari – 03 Februari 2023
 - b) Pelapasan Praktikum : 03 Februari 2023
- 2. Lapangan : 08 Februari – 15 April 2023
- 3. Pasca Lapangan :
 - a) Bimbingan Penulisan Laporan : 16 April – 26 April 2023
 - b) Pendaftaran Ujian : 27 – 29 April 2023
 - c) Ujian Lisan Praktikum : 1 – 2 Mei 2023
 - d) Perbaikan dan Penyerahan Laporan : 03 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap sebelum turun ke lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium pada setiap profilnya, antara lain sebagai berikut:

a Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:

1. Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan
2. Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan.
3. Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
 - 1) Mengetahui populasi kelompok sasaran (population target group) dan lingkungan sosialnya.
 - 2) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
 - 3) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - 4) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - 5) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.

b Serah terima praktikan

dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum Serah terima praktikan kepada kelurahan, yang dilaksanakan secara luring

2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial

1. Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, ME yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:
 - 1) Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial.
 - 2) Model jaminan sosial yang digunakan.
 - 3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial.
 - 4) Merancang program jaminan sosial.
 - 5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial.
 - 6) Stakeholder terkait program jaminan sosial.
2. Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
 - 1) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia.
 - 2) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial.
 - 3) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial.
 - 4) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial.
 - 5) Keterampilan
 - 6) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - 7) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
3. Praktik jaminan sosial :
 - 1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.
 - 2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 - 3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
 - 4) Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial.

b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber dana bantuan sosial

1. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Bapak Tonton Heriyanto, S.Sos yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari, 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi :
 - 1) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.
 - 2) Model sumber dana bantuan sosial yang digunakan.
 - 3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
 - 4) Merancang program sumber dana bantuan sosial.
 - 5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial.
 - 6) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial
2. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut :
 - 1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya.
 - 2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial.
 - 3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial.
 - 4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial.
 - 5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial.
 - 6) Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial.
 - 7) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
 - 8) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
 - 9) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
 - 10) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
 - 11) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial.

3. Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial :

- 1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Sumber dana bantuan sosial
- 2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
- 3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
- 4) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial.

c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

1. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Bapa Samsul Maarif yang dilakukan pada Rabu, 8 Maret 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
 - 1) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial.
 - 2) Model pemberdayaan sosial, yang digunakan.
 - 3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam Pemberdayaan Sosial.
 - 4) Merancang program Pemberdayaan Sosial.
 - 5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial.
 - 6) Stakeholder terkait program Pemberdayaan Sosial.
2. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut :
 - 1) Menguasai Konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial.
 - 2) Menguasai Konsep dan teknologi pemberdayaan sosial.
 - 3) Menguasai Konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial.
 - 4) Menguasai Konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial.
 - 5) Menguasai Konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial.
 - 6) Menguasai Konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial.
 - 7) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - 8) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial.

- 9) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial.
 - 10) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial.
 - 11) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial.
3. Praktik Pemberdayaan Sosial
- 1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
 - 2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 - 3) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
 - 4) Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial

d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial

1. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Bapa Ade Reno, AKS, MSW, yang dilakukan pada Jumat, 24 Maret 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi :
2. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut :
 - 1) Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial.
 - 2) Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
 - 3) Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam..
 - 4) Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia.
 - 5) Menguasai Konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem.
 - 6) Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - 7) Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial.
 - 8) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial.
 - 9) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam .
 - 10) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

3. Praktik Penataan Lingkungan Sosial :
 - 1) Melakukan pendekatan awal
 - 2) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder.
 - 3) Menyusun Rencana Intervensi
 - 4) Menyusun laporan praktik analisis penataan lingkungan sosial

e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana

1. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh Bapak Mohd. Robi Amri yang dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023. Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi :
 - 1) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana.
 - 2) Model penanggulangan bencana yang digunakan.
 - 3) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.
 - 4) Merancang program penanggulangan bencana.
 - 5) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana.
 - 6) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana
2. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analisis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
 - 1) Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya.
 - 2) Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana.
 - 3) Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana..
 - 4) Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana.
 - 5) Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
 - 6) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana.
 - 7) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
 - 8) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi.
 - 9) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana.

10) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana

3. Praktik Penanggulangan Bencana

- 1) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana.
- 2) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder.
- 3) Menyusun Rencana Intervensi.
- 4) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana.

3. Tahap Pasca Lapangan

- a Finalisasi Laporan
- b Ujian Lisan Praktikum
- c Perbaikan dan Penyerahan Laporan

E. Sistematika Laporan

Output dari kegiatan praktikum ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan.

Berikut ini adalah sistematika laporan akhir individu Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 dimana sistematika laporan ini akan digunakan oleh praktikan dalam menyusun hasil laporan praktikum

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.

BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM, yang berisi tentang Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, hasil asesmen, dan rencana intervensi.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat kesimpulan hasil praktikum dan rekomendasi yang ditunjukkan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analisis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, maka dengan demikian kesehatan merupakan bagian dari hak setiap warga yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara harus mengakui bahwa kesehatan dapat menjadi modal besar untuk menciptakan kondisi masyarakat yang produktif dan sejahtera. Maka dari itu, sesuai dengan kewajiban negara untuk memelihara dan menjaga warga negaranya, pemerintah membentuk sebuah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Melalui BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan merupakan suatu program yang dirancang oleh pemerintah dengan fokus menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun dan TNI/POLRI. Program BPJS ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi seluruh warga negara. Sedangkan untuk orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Dan untuk warga miskin nantinya BPJS akan ditanggung pemerintah sebagai Program Bantuan Iuran.

Terdapat dua kategori kepesertaan dalam Program JKN yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan NON Penerima Iuran (PBI). Dengan lebih lanjut, peserta PBI diperuntukan bagi orang ataupun keluarga yang kehidupannya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan peserta Non PBI untuk kelompok yang bukan tergolong dari fakir miskin dan tidak mampu.

Melihat kondisi sosial objektif di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage khususnya di RW 10 Perumahan Adipura yang menjadi lokasi praktikan terkait dengan fokus analisis jaminan sosial. Implementasi program BPJS yang dirasakan oleh warga RW 10 dinilai masih kurang optimal. Setelah melakukan berbagai wawancara dengan Ketua RW dan pengambilan sampel dari berbagai warga, didapatkan hasil bahwa terdapat Peserta JKN di RW 10 merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Penyebab dari isu tersebut dikarenakan pelayanan yang dinilai kurang baik dan akses yang cukup sulit. Melihat kondisi tersebut, sampai pada akhirnya warga mencari program Jaminan Kesehatan Non Pemerintah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan program dari BPJS Kesehatan.

Artinya, pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan memberikan pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi satu sorotan dan menjadi isu yang penting bagi pemerintah dalam memberikan layanan.. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang sebagian ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam prosesnya dan penyediaan layanan yang lamban. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan bagian dari harapan seluruh masyarakat, namun dengan demikian, jika kita lihat kondisi empiris nya ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2. Tinjauan Konsep

a Perlindungan sosial

Menurut International Labour Organization (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan. (International Labour Organization, 2012).

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin.

b Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H bahwa: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Menurut ILO (1952 : 102), jaminan sosial didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat untuk para anggotanya melalui seperangkat instrument public, terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh karena terhentinya atau turunnya penghasilan diakibatkan oleh sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian.

Menurut UU No 40 Tahun 2004 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. UU 11 tahun 2009 Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

c BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat, terutama untuk PNS, Penerima Bantuan Pensiun PNS, TNI/POLRI. Sedangkan untuk orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Dan untuk warga miskin nantinya BPJS akan ditanggung pemerintah sebagai Program Bantuan Iuran. Dalam kepesertaannya BPJS Kesehatan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan NON PBI. Berangkat dari suatu pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dibentuknya Program JKN ini adalah untuk menjamin kesehatan publik

d Dasar Hukum BPJS Kesehatan

Dasar Hukum Program BPJS Kesehatan :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang - Uundang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4) Pedoman Umum Good Governance BPJS Kesehatan
- 5) Board Manual BPJS Kesehatan
- 6) Kode Etik BPJS Kesehatan

e Persyaratan BPJS Kesehatan

Dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi kepesertaan dan memperoleh pelayanan dari Program BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Kartu Keluarga seta Kartu Tanda Penduduk sebanyak satu lembar
- 2) Foto Copy Akte Kelahiran

- 3) Pas Foto Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah
- 4) Foto Copy Buku Rekening Bank (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN)
- 5) Surat keterangan dari Sekolah atau Perguruan Tinggi (Apabila telah menempuh pendidikan)

f Manfaat Program BPJS Kesehatan

Berdasarkan dari situs resmi BPJS Kesehatan terdapat beberapa manfaat dari adanya program BPJS Kesehatan, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:
 - a) Puskesmas atau yang setara Praktik Mandiri Dokter
 - b) Praktik Mandiri Dokter Gigi
 - c) Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri
 - d) Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara faskes penunjang: Apotik dan Laboratorium
2. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 - a) Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif)
 - 1) Penyuluhan kesehatan perorangan
 - 2) Imunisasi rutin
 - 3) Keluarga Berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan BKKBN
 - 4) Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu, yang diberikan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu
 - 5) Peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis
 - b) Pelayanan kuratif dan rehabilitatif :
 - 1) Adminitrasi pelayanan
 - 2) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis
 - 3) Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif
 - 4) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
 - 5) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama

g Tata cara pengajuan Program BPJS Kesehatan

Berikut alur tahapan pengajuan BPJS Mandiri secara langsung :

- 1) Calon peserta mendaftar secara perorangan di kantor BPJS Kesehatan terdekat
- 2) Mengisi formulir pendaftaran untuk memilih kelas BPJS dan juga faskes tingkat 1, untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri, sebaiknya memilih kelas 1 dan 2 3.
- 3) Serahkan formulir dan berkas yang telah diisi ke petugas untuk pemeriksaan kelengkapan serta mengambil nomor antrian.
- 4) Setelah itu, calon peserta akan mendapat nomor virtual account beserta besaran iuran yang harus dibayar.
- 5) Peserta yang telah menerima virtual account harus melakukan pembayaran iuran pertama. Pembayaran iuran pertama paling cepat setelah 14 hari setelah penerimaan virtual account dan paling lambat sampai 30 hari.
- 6) Setelah melakukan pembayaran, jangan lupa simpan bukti pembayaran
- 7) Calon peserta menuju ke kantor BPJS tempat pendaftaran untuk mencetak kartu BPJS Kesehatan

Selanjutnya adalah, cara pengajuan secara online melalui website www.BpjsKesehatan.go.id dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Buka situs resmi BPJS, pilih bagian layanan dan pendaftaran online yang tampil di halaman utama.
- 2) Klik tombol pendaftaran untuk melanjutkan proses pendaftaran.
- 3) Lengkapi formulir pendaftaran dengan melengkapi nomorKK, nomor Ponsel, nomor NPWP, serta alamat peserta.
- 4) Pilih fasilitas kesehatan BPJS yang diinginkan.
- 5) Upload foto peserta dengan maksimal ukuran 50 kb.
- 6) Klik tombol selanjutnyadan lengkapi formulir isian berupa data anggota keluarga, kelas perawatan, nomor rekening, dan alamat email.
- 7) Kirim formulir tersebut dengan mengklik tombol kirim email.
- 8) Lakukan aktivasi nomor virtual account akan dikirim ke email peserta.
- 9) Lakukan pembayaran melalui teller atau ATM yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan simpan bukti pembayarannya.
- 10) Setelah pembayaran, peserta dapat mencetak e-ID secara mandiri dan mengambil kartu BPJS Kesehatan di kantor BPJS terdekat.

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Di dalam kehidupan sosial tentunya tidak terlepas dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Bukan suatu kehidupan jika dalam prosesnya tidak dihadapkan dengan suatu permasalahan. Masalah sosial merupakan sebuah masalah yang rentan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial. Maka dari itu, dengan banyak permasalahan dalam sebuah kehidupan sosial, perlu adanya sebuah teknik asesmen untuk mencari masalah apa yang terjadi, apa penyebab masalahnya, dan bagaimana akibat ataupun dampak dari permasalahan tersebut. Teknik asesmen ini dapat mempermudah guna menemukan suatu cara yang pasti dengan menganalisis masalah sampai ke akar-akarnya hingga sampai pada akhirnya menemukan solusi yang berujung win-win solution.

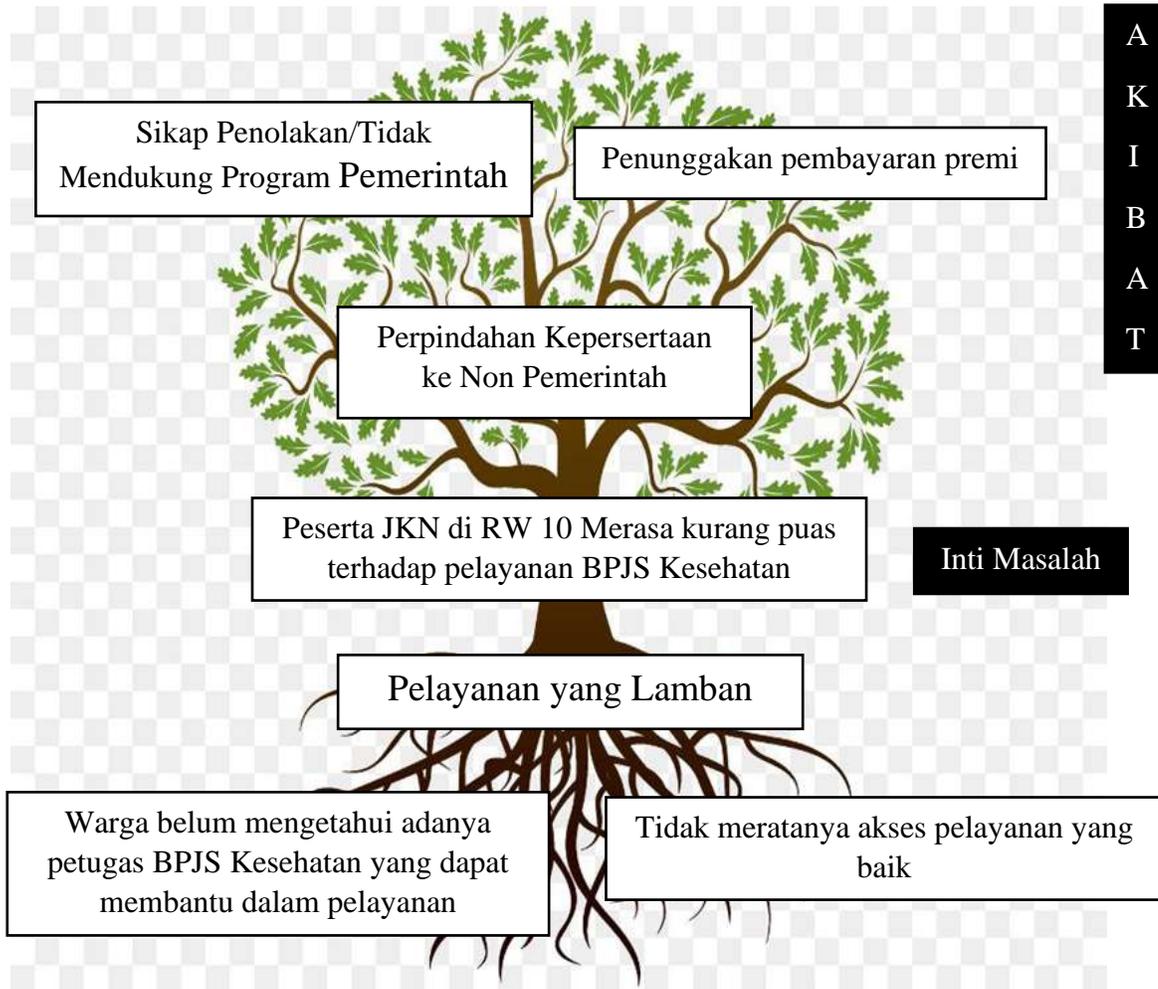
Berdasarkan gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi fokus isu atau permasalahan terkait dengan jaminan sosial yakni "Warga RW 10 merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan". Permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat RW 10 Perumahan Adipura berkaitan langsung dengan Program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu dalam Program BPJS Kesehatan.

Melihat kondisi sosial objektif di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage khususnya di RW 10 Perumahan Adipura. Implementasi program BPJS yang dirasakan oleh warga RW 10 dinilai masih kurang optimal. Setelah melakukan berbagai wawancara dengan Ketua RW dan pengambilan sampel dari berbagai warga, didapatkan hasil bahwa terdapat warga yang tidak melanjutkan / menonaktifkan kepesertaan dari program BPJS Kesehatan ke Program Jaminan Kesehatan Non Pemerintah.

b. Analisis Masalah

Dalam meng-analisis permasalahan tersebut tentunya praktikan menggunakan Metoda dan Teknik Asesmen Pekerjaan Sosial yakni "Analisis Pohon Masalah". Teknik Analisis Pohon Masalah merupakan suatu teknik untuk mencari sebab dan akibat dari suatu permasalahan dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1. Pohon Masalah Jaminan Sosial



c. Fokus masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu “Peserta JKN di RW 10 merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan”.

d. Penyebab Masalah

Dari hasil analisis sebab akibat dengan menggunakan Metoda dan Teknik Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan penyebab dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- 1) Implementasi BPJS Kesehatan yang dinilai masih kurang optimal karena pelayanan yang diberikan masih terdapat beberapa permasalahan seperti pelayanan yang lamban

- 2) Se jauh ini warga rw 10 belum mengetahui bahwasanya terdapat petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit yang dapat membantu mereka dalam pelayanan jika ada penyimpangan dalam pelayanannya
- 3) Tidak meratanya akses pelayanan yang baik, baik itu dalam kesetaraan pelayanan antar kelas BPJS Kesehatan maupun kesetaraan akses pelayanan antar rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

e. Dampak Masalah

- 1) Terdapat sikap penolakan oleh warga terhadap program BPJS Kesehatan, artinya sikap tersebut menunjukkan bahwa tidak mendukungnya program yang telah dibentuk oleh pemerintah
- 2) Warga rw 10 tidak membayar premi dalam setiap bulannya, sehingga terdapat penagihan secara langsung oleh Kader JKN-KIS
- 3) Perpindahan kepesertaan dari pemerintah ke non pemerintah

f. Identifikasi Kebutuhan

Berikut merupakan apa yang menjadi kebutuhan dari permasalahan yang diangkat :

- 1) Kebutuhan akan Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 2) Penempatan Petugas BPJS Kesehatan secara menyeluruh di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- 3) Meningkatkan pengetahuan kepada warga terkait adanya petugas bpjs kesehatan yang dapat membantu dalam pelayanan
- 4) Membangun kepercayaan kepada masyarakat terhadap Program BPJS Kesehatan guna untuk meminimalisir terjadinya sikap penolakan

g. Identifikasi Potensi dan Sumber

- 1) BPJS Kesehatan Kota Bandung (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan)
 Dalam hal ini, rencana intervensi yang akan dilakukan nantinya mengambil peran sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi Peserta JKN untuk menyampaikan kebutuhan ataupun keluhan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- 2) Petugas BPJS SATU / JKN-KIS
 Dalam hal ini, rencana intervensi yang akan dilakukan nantinya mengambil peran sebagai advocate, artinya Petugas JKN-KIS menindaklanjuti yang menjadi keluhan oleh Peserta JKN terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

4) Rencana Intervensi

a Latar Belakang

Melihat kondisi sosial objektif di masyarakat, implementasi program BPJS Kesehatan dinilai masih kurang optimal. Kebijakan dan pelayanan publik yang dirancang oleh pemerintah masih dituai dengan berbagai permasalahan, pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai suatu kemunduran yang sebagian besar ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam prosesnya dan penyediaan layanan yang lamban.

Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan bagian dari harapan seluruh masyarakat. Namun dengan demikian, jika kita lihat kondisi empiris ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berangkat dari isu tersebut, maka diperlukan suatu rencana intervensi guna membantu keberhasilan program yang telah dibentuk oleh pemerintah.

b. Nama Program

Program “Sosialisasi Fungsi dan Peran Petugas BPJS Kesehatan dalam merespon keluhan Peserta JKN di Wilayah RW 10”.

c. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Terbentuknya program yang dapat merespon keluhan dari Peserta JKN yang ada di RW 10, serta dapat memperkenalkan Petugas BPJS Kesehatan kepada Peserta JKN dalam bentuk kegiatan sosialisasi

2. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan rasa kepuasan masyarakat terhadap Program BPJS Kesehatan
- 2) Mensosialisasikan Petugas BPJS Kesehatan kepada masyarakat
- 3) Meminimalisir adanya penonaktifan kepesertaan BPJS kesehatan

e. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada Peserta JKN di RW 10 terkait Fungsi dan Peran Petugas BPJS Kesehatan melalui kegiatan sosialisasi serta memperkenalkan bahwa adanya Petugas BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit yang dapat membantu dan mempermudah pelayanan. Sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Petugas BPJS Kesehatan dengan memperjelas Peran Petugas dari BPJS Kesehatan itu sendiri.

f. Sistem Partisipan

Sistem Partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Sistem Partisipan Jaminan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agen System	a) Pekerja sosial b) Petugas BPJS Kesehatan
3.	Client System	Warga RW 10
4.	Support System	a. BPJS Kesehatan b. Petugas BPJS Kesehatan c. Kelurahan Rancabolang d. Ketua RW 10
5.	Controlling System	Pekerja Sosial
6.	Implementing System	a) Pekerja sosial b) Petugas BPJS Kesehatan
7.	Target System	a. Warga RW 10 b. Kecamatan Gedebage c. Kelurahan Rancabolang
8.	Action System	a. Pekerja Sosial b. Petugas BPJS Kesehatan

f. Metoda dan Teknik yang digunakan

Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan intervensi terhadap isu dan permasalahan yang ada yaitu dengan menggunakan Teknik *Community Development / Community Organization* (Pengembangan Masyarakat/Pengembangan Organisasi). Teknik CO/CD merupakan suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang tertentu.

Teknik yang digunakan oleh praktikan adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan teknik peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

g. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang digunakan

Berikut rincian biaya dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan program :

Tabel 2. Rencana Anggaran dan Biaya Jaminan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
	Infokus	1	Unit	150.000,00	150.000,00
	Layar Proyektor	1	Unit	50.000,00	50.000,00
	Jumlah I				925.000,00
2.	Honorarium				
	Petugas BPJS Kesehatan	2	Orang/Jam	9.00.000,00	1.800.000,00
	Jumlah II				1.800.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	40	Box	10.000,00	400.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				500.000,00
	Jumlah Keseluruhan				3.225.000,00

h. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan Analisis SWOT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Analisis SWOT Jaminan Sosial

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya narasumber yang tepat 2. Kegiatan di dukung oleh pemerintah daerah 3. Sikap terbuka dari warga rw 10 	<p>Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipan tidak menyimak materi yang disampaikan
<p>Oppurtunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat meningkatkan rasa kepuasan warga Rw 10 yang menjadi Peserta JKN 2. Meminimalisir penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Warga RW 10 3. Mendukung Program BPJS Kesehatan 4. Mengetahui peran dari Petugas BPJS Kesehatan 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Petugas BPJS Kesehatan 2. Meningkatkan pendampingan oleh Petugas BPJS Kesehatan 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian sosialisasi yang dikemas dengan menarik dan menggunakan gaya komunikasi diskusi atau dua arah 2. Menggunakan bahasa daerah dalam penyampaianya
<p>Threat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta tidak ikut serta dalam kegiatan 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dari jauh hari dan tidak dadakan 2. Membuat promosi kegiatan dengan design yang menarik 3. Membuat doorprize dalam kegiatan serta diselingi dengan bermain game 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat acara yang efektif dan efesian 2. Melakukan Monitoring selama kegiatan dan Evaluasi dari setiap hasil kegiatan

i. Jadwal dan Langkah-langkah

Berikut jadwal dan langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

1. Pra pelaksana
 - 1) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
 - 2) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
 - 3) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
 - 4) Praktikan mengundang Petugas BPJS Kesehatan, Lurah Rancabolang, Ketua RW 10 dan Pekerja Sosial Masyarakat
2. Pelaksanaan
 - 1) Sambutan Oleh Lurah Rancabolang
 - 2) Sambutan Oleh Ketua RW 10
 - 3) Pembacaan Doa oleh Praktikan
 - 4) Pemberian materi terkait fungsi dan peran petugas BPJS Kesehatan
 - 5) Pemberian materi terkait layanan pengaduan BPJS Kesehatan
 - 6) Pengulasan materi oleh pekerja sosial masyarakat
 - 7) Penutup
3. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Pendampingan
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Dokumentasi Sebagai Bukti Kegiatan

Tabel 4. Jadwal dan Langkah Jaminan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	10.00-10.15	Sambutan Lurah	Sie. Acara	Sambutan oleh Lurah Rancabolang
2.	10.15 – 10.30	Sambutan RW	Sie. Acara	Sambutan oleh ketua RW 10
3.	10.30 – 10.45	Pembacaan doa	Sie. Acara	Pembacaan doa oleh praktikan
4.	10.45 - 12.00	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Fungsi dan Peran Petugas BPJS Kesehatan Pemateri : Petugas BPJS Kesehatan
5.	12.00 - 12.45	ISHOMA	Sie. Konsumsi	Istirahat, sholat zuhur, dan makan siang
6.	12.45-13.00	Ice Breaking	Sie. Acara	-
7.	13.00 - 14.45	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Layanan Pengaduan BPJS Kesehatan Pemateri : Petugas BPJS Kesehatan
8.	14.45 -15.00	Pengulangan Materi	Sie. Acara	Pengulangan materi oleh Pekerja Sosial
9	15.00-15.15	Penutup	Sie. Acara	-

B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, kelompok ataupun masyarakat agar menciptakan kondisi yang sejahtera. Program bantuan sosial merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh lembaga sosial masyarakat maupun perusahaan swasta yang ada dalam bentuk program maupun kegiatan charity/penggalangan dana. Terdapat 3 model sumber dana bantuan sosial. Pertama, Model dana yang bersumber dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah melalui APBN/APBD dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Kedua, dana bantuan sosial yang bersumber dari Bantuan/Hibah Luar Negeri. Negara melalui pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema Government to Government (Pemerintah negara lain kepada pemerintah pusat/daerah) atau Private to Government (Swasta/Masyarakat/Organisasi luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah) atau Private to Private (Swasta/Masyarakat/Organisasi luar negeri kepada Swasta/Masyarakat/Organisasi dalam negeri). Dan yang ketiga, dana bantuan sosial yang bersumber dari Dana Hibah, Sumbangan (Pengumpulan uang dan barang), dan Undian (Pajak Undian Berhadiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh praktikan di lapangan, terdapat suatu yayasan kegamaan yang bergerak di bidang sosial. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sedekah Masjid. Yayasan Sedekah Masjid merupakan sebuah lembaga sosial yang berdiri pada tahun 2018 dan baru mulai aktif di tahun 2019. Munculnya yayasan ini didorong oleh keinginan pengurus masjid akan adanya keberlanjutan dalam memakmurkan masjid dan jamaahnya. Secara umum yayasan sedekah masjid memiliki 2 bentuk kategori program. Pertama adalah program Peduli Masjid. Program Peduli masjid merupakan program yang memposisikan sebagai jamaah yang peduli pada masjid yang berada di perkampungan, untuk programnya sendiri seperti membangun kembali masjid-masjid, tebar karpet, renovasi masjid dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Program Masjid Peduli, program ini merupakan program yang memposisikan sebagai masjid yang peduli kepada jamaahnya, programnya seperti masjid peduli yatim, dan bantuan sembako.

Melihat kondisi objektif di lapangan bahwasanya terdapat beberapa kegiatan program yang masih terkendala terkait dengan sumber dana yang diterima, seperti dana yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan. Sumber dana yang diterima oleh pihak yayasan dalam setiap penyelenggaraan program melalui *online campaign*, atau

membuka donasi melalui media sosial. Sejauh ini dari pihak yayasan belum membangun hubungan kerja sama dengan stakeholder untuk mencari bantuan sumber dana dalam menutupi kekurangan dari setiap kebutuhan program. Maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi dan memperlancar pelaksanaan program, perlu adanya peningkatan hubungan kerja sama/kemitraan dengan stakeholder seperti CSR Perusahaan

Tentunya indikator keberhasilan dari setiap pelaksanaan program adalah adanya hubungan kerja sama / menjalin kemitraan dengan stakeholder dan sumber dana yang pasti, artinya dalam setiap penyelenggaraan program terdapat sumber dana yang seimbang dengan kebutuhan dari program tersebut. Karena suatu program tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak ada dukungan dari pihak terkait dan sumber dana yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan program

2. Tinjauan Konsep

a Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah merupakan bantuan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Menurut Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sedangkan, Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

b Tujuan Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa Tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- 3) Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- 5) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

c Sumber Dana Bantuan Sosial

Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) ada 3 yaitu bersumber dari masyarakat, dana hibah, dan negara antara lain :

- 1) Negara
Pemerintah mengelola bantuan sosial yang bersumber dari pajak melalui APBN/APBD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengumpulan uang dan barang serta pengelolaan pajak undian yang dituangkan dalam bentuk Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana bantuan sosial yang bersumber dari Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pajak yang dituangkan dalam APBN/APBD dan UKS. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari negara antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya.
- 2) Hibah Luar Negeri
Negara melalui Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema Government to Government (Pemerintah Negara lain kepada pemerintah pusat/daerah), atau Private to

Government (Swasta/masyarakat/organisasi dari luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah), atau skema Private to Private (Masyarakat/swasta/organisasi luar negeri kepada swasta/masyarakat/organisasi dalam negeri) Pelaksanaan bantuan sosial dari luar negeri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Tidak untuk mendanai terorisme, radikalisme, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penggunaan bantuan dari luar negeri harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Masyarakat

Sesuai prinsip kesetiakawanan sosial bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, salah satu wujud peran serta masyarakat yaitu pemberian sumbangan sosial berupa uang atau barang bagi perorangan atau kelompok dengan tujuan agar dana yang terkumpul dapat membantu penanganan permasalahan sosial. Usaha pengumpulan sumbangan sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan sosial adalah pertanggungjawaban terhadap sumbangan sosial yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengumpulan uang dan barang baik secara teknis maupun administratif. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari masyarakat antara lain diperoleh dari kedermawanan orang; Lembaga sosial (rumah zakat, rumah yatim, Baznas, kita bisa.com); dana hibah seperti sumbangan (pengumpulan uang dan barang) dan undian (pajak undian berhadiah); dana berdasarkan kearifan lokal (beas perelek, rereongan sarumpi, beas jimpitan, serikat tolong menolong).

d Kemitraan

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sementara itu, dijelaskan dalam buku Kemitraan Usaha oleh Muhammad Jafar Hafshah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Kemitraan menegakkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan antara satu sama lain. Lalu menurut Ian Linton dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama, kemitraan adalah sebuah cara dalam melakukan bisnis di mana pemasok dan pelanggan berniaga (berjualan)

satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Dengan begitu, kemitraan adalah suatu kerja sama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha lebih luas lagi

Menurut Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy yang dikutip dari buku Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan. Terdapat empat jenis kemitraan atau tipe kemitraan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Potensial Partnership
Pada jenis kemitraan ini pelaku yang menjalin kerja sama saling peduli antara satu sama lain. Namun kedua belah pihak belum bekerja sama secara lebih dekat, baru sebatas hubungan kemitraan saja.
- 2) Nescent Partnership
Dalam jenis kemitraan yang satu ini, para pelaku kemitraan adalah partner (pasangan) akan tetapi efisiensi kerja sama menjadi kurang maksimal.
- 3) Complementary Partnership
Complementary partnership menjelaskan bahwa partner atau mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar terhadap ruang lingkup aktivitas yang tetap serta cenderung terbatas, contohnya seperti program delivery dan resource mobilization
- 4) Synergistic Partnership
Terakhir adalah synergistic partnership, di mana kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistematis melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam membangun sebuah kemitraan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kesamaan Visi-Misi
- 2) Komunikasi timbal balik
- 3) Kepercayaan
- 4) Komitmen yang kuat
- 5) Efisiensi dan Efektivitas
- 6) Saling menguntungkan

e Yayasan Sedekah Masjid

Yayasan Sedekah Masjid merupakan sebuah lembaga sosial yang fokus bergerak di bidang sosial keagamaan khususnya masjid, mulai dari pembangunan masjid, renovasi masjid, kebersihan masjid sampai dengan kemakmuran masjid.

- 1) Visi Yayasan Sedekah Masjid:
 - a) Mewujudkan masjid yang kokoh, nyaman dan makmur
 - b) Mewujudkan pengelolaan masjid yang professional dan bertanggungjawab
 - c) Menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang nyaman
- 2) Misi Yayasan Sedekah Masjid
Menjadikan Lembaga pembangunan masjid yang terpercaya di Indonesia
- 3) Legalitas Yayasan Sedekah Masjid:
 - a) Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Yayasan Sedekah Masjid Nomor 21 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, SH.
 - b) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0009296.AH.01.04 tahun 2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sedekah Masjid
 - c) Surat Keterangan Ijin Operasional dari Dinas Kota Bandung No.IV-01-02/6450-DINSOSNANGKIS/XI/2020
- 3) Program Bantuan Yayasan Sedekah Masjid
 - a) Yayasan Sedekah Masjid Peduli Yatim
 - b) Tebar Karpet Masjid
 - c) Borong Dagangan Pedagang Kecil
 - d) Bedah RuTiLaHu Jamaah Masjid
 - e) Sedekah Madrasah di Perkampungan

3. Asesmen

a Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh praktikan di lapangan, terdapat suatu yayasan keagamaan yang bergerak di bidang sosial. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sedekah Masjid. Yayasan Sedekah Masjid merupakan sebuah lembaga sosial yang berdiri pada tahun 2018 dan baru mulai aktif di tahun 2019. Munculnya yayasan ini didorong oleh keinginan pengurus masjid akan adanya keberlanjutan dalam memakmurkan masjid dan jamaahnya. Secara umum yayasan sedekah masjid memiliki 2 bentuk kategori program. Pertama adalah program Peduli Masjid. Program Peduli masjid merupakan program yang memposisikan sebagai jamaah yang peduli pada masjid yang berada di perkampungan, untuk programnya sendiri seperti membangun kembali masjid-masjid, tebar karpet, renovasi masjid dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Program Masjid Peduli, program ini

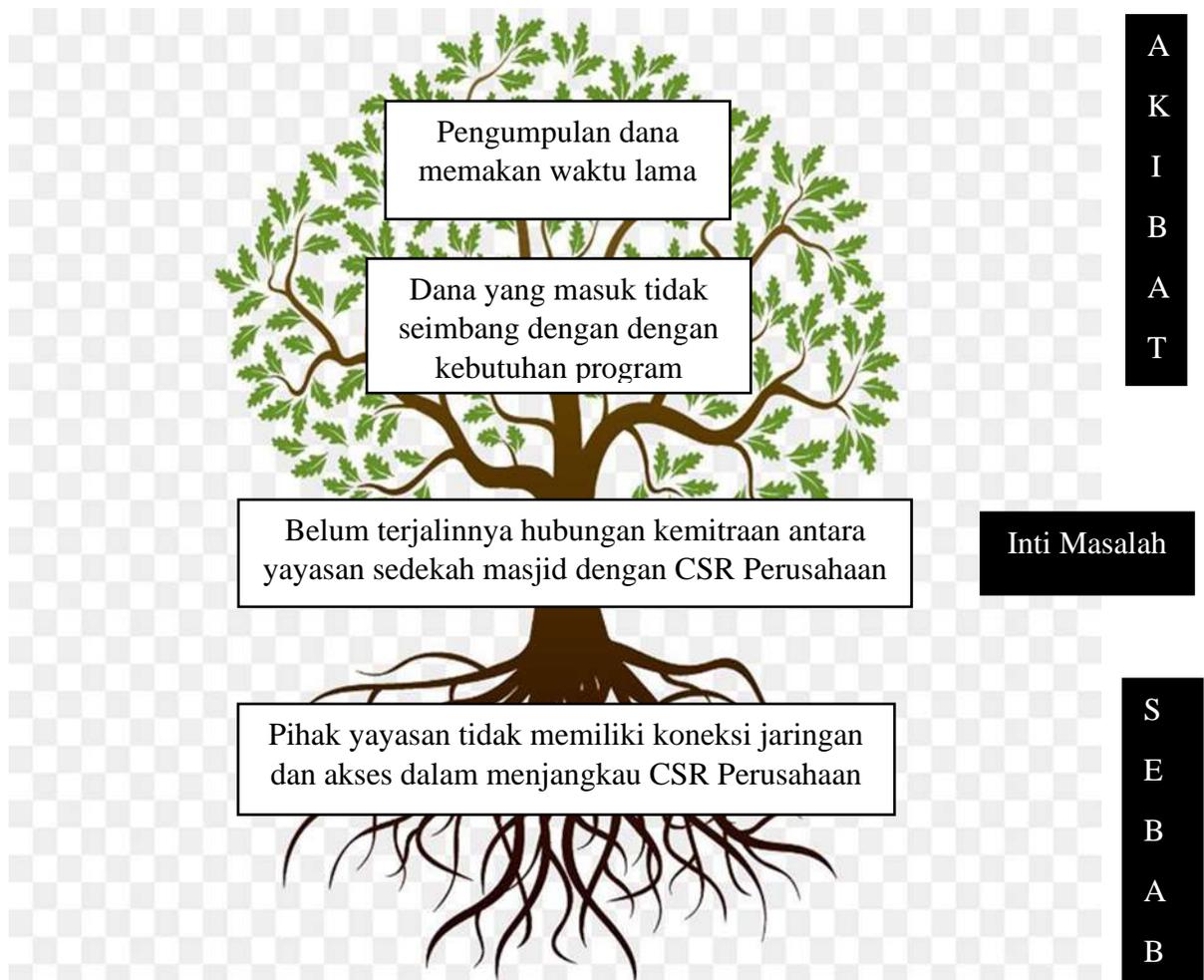
merupakan program yang memosisikan sebagai masjid yang peduli kepada jamaahnya, programnya seperti masjid peduli yatim, dan bantuan sembako

Melihat kondisi objektif di lapangan bahwasanya terdapat beberapa program yang masih terkendala terkait dengan sumber dana yang diterima seperti dana yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan. Sumber dana yang diterima oleh pihak yayasan dalam setiap penyelenggaraan program hanya melalui *online campaign*, atau membuka donasi melalui media sosial. Sejauh ini dari pihak yayasan belum membangun hubungan kerja sama dengan stakeholder dalam mencari bantuan sumber dana untuk menutup kekurangan dari setiap kebutuhan program. Hal ini dikarenakan pihak yayasan tidak memiliki koneksi jaringan serta akses dalam menjangkau. Maka dari itu untuk mempertahankan eksistensi dan kelancaran pelaksanaan program, perlu adanya peningkatan kemitraan dengan stakeholder seperti CSR Perusahaan dalam menciptakan program yang sustainable

b Analisis Masalah

Dalam menganalisis suatu permasalahan, praktikan menggunakan metode analisis sebab dan akibat dengan rincian sebagai berikut

Gambar 2. Pohon Masalah Sumber dana bantuan sosial



c Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah “Belum terjalinnya hubungan kemitraan antara yayasan sedekah masjid dengan CSR Perusahaan”.

d Penyebab Masalah

Dari hasil analisis sebab akibat dengan menggunakan Metoda dan Teknik Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan penyebab dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak yayasan tidak memiliki koneksi jaringan dan akses dalam menjangkau CSR Perusahaan

e Dampak Masalah

Berikut dampak dari masalah “Belum terjalinnya hubungan kemitraan antara Yayasan Sedekah Masjid dengan CSR Perusahaan”:

- 1) Pengumpulan dana yang memakan waktu lama
- 2) Dana yang masuk tidak seimbang dengan kebutuhan program

f Identifikasi Kebutuhan

Berikut apa yang menjadi kebutuhan dari permasalahan yang diangkat :

- 1) Kebutuhan akan dukungan dari stakeholder
- 2) Kebutuhan akan sponsor dalam setiap pelaksanaan program
- 3) Meningkatkan serta Menperluas koneksi jaringan dengan stakeholder
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dalam menjangkau stakeholder

g Identifikasi Potensi dan Sumber

- 1) Pihak kelurahan, dalam hal ini pihak kelurahan dapat mensupport program yang diselenggarakan oleh pihak yayasan
- 2) Ketua RW 10, karena yayasan sedekah masjid berada di lingkungan RW 10 dan ketua rw nya pun memiliki banyak koneksi yang mana dapat membantu pihak yayasan dalam bermitra dengan perusahaan terkait

4. Rencana Intervensi

a Latar Belakang

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh praktikan di lapangan, terdapat suatu yayasan keagamaan yang bergerak di bidang sosial. Yayasan tersebut bernama Yayasan Sedekah Masjid. Yayasan Sedekah Masjid merupakan sebuah lembaga sosial yang berdiri pada tahun 2018 dan baru mulai aktif di tahun 2019. Munculnya yayasan ini didorong oleh keinginan pengurus masjid akan adanya keberlanjutan dalam memakmurkan masjid dan jamaahnya. Secara umum yayasan sedekah masjid memiliki 2 bentuk kategori program. Pertama adalah program Peduli Masjid. Program Peduli masjid merupakan program yang memposisikan sebagai

jamaah yang peduli pada masjid yang berada di perkampungan, untuk programnya sendiri seperti membangun kembali masjid-masjid, tebar karpet, renovasi masjid dan lain sebagainya. Dan yang kedua, Program Masjid Peduli, program ini merupakan program yang memposisikan sebagai masjid yang peduli kepada jamaahnya, programnya seperti masjid peduli yatim, dan bantuan sembako.

Namun dibalik dari beberapa program yang telah dijalankan masih terdapat beberapa hambatan terkait dengan sumber dana yang diterima. Sumber dana yang diterima hanya melalui *online campaign*, membuka donasi melalui website ataupun media sosial dan belum ada mitra yang bekerja sama dengan yayasan. Dalam hal ini dikhawatirkan jika sewaktu-waktu terdapat kendala seperti sepi nya donatur, maka akan berpengaruh juga terhadap kelancaran program. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan strategi kemitraan dengan stakeholder seperti NGO/Perusahaan Swasta yang memiliki Program CSR.

Berangkat dari permasalahan tersebut. Praktikan berinisiatif membuat rencana intervensi untuk meningkatkan kemitraan antara Yayasan Sedekah Masjid dengan CSR Perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan akhir dari rencana intervensi ini adalah untuk melancarkan program yang telah diselenggarakan oleh pihak yayasan dan menciptakan program yang sustainable.

b Nama Program

Program “Sosialisasi Peningkatan Kerjasama Kemitraan” oleh pekerja sosial dan fundraiser kepada pihak Yayasan Sedekah Masjid

c Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

Meningkatkan strategi kemitraan antara Yayasan Sedekah Masjid dengan Stakeholder terkait, khususnya dengan CSR Perusahaan

2. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan Kapasitas pengetahuan dengan membekali pengetahuan kepada pihak yayasan terkait dengan prinsip dan mekanisme dalam menjalin kemitraan
- 2) Memperluas jaringan koneksi dan hubungan antar yayasan dengan pihak-pihak terkait
- 3) Mempertahankan Eksistensi Program Yayasan Sedekah Masjid dalam menciptakan program yang sustainable

d Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan memberikan pengetahuan kepada pengurus yayasan sedekah masjid dalam bentuk sosialisasi terkait dengan bagaimana cara menjalin hubungan kemitraan dengan stakeholder terkait, khususnya CSR Perusahaan.

Dalam kegiatan nantinya akan dikemas dengan berbagai materi terkait dengan Prinsip dan Mekanisme dalam menjalin sebuah kemitraan

e **Sistem Partisipan**

Sistem Partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Sistem Partisipan Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agent System	a. Pekerja sosial b. Fundraiser
3.	Client System	Yayasan Sedekah Masjid
4.	Support System	a. Kelurahan Rancabolang b. Ketua RW 10 c. Fundraiser
5.	Controlling System	a. Pekerja Sosial b. Ketua RW 10
6.	Implementing System	a. Pekerja sosial b. Fundraiser
7.	Target System	a. Yayasan Sedekah Masjid b. Kelurahan Rancabolang
8.	Action System	a. Pekerja Sosial b. Fundraiser

f **Metoda dan Teknik**

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau “Community Organization dan Community Development”, yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini Pengurus Yayasan Sedekah Masjid mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, dan dapat memanfaatkan potensi sumber di lingkungan. adapun teknik yang digunakan oleh praktikan sebagai berikut :

1. Penyuluh Sosial

Penyuluhan Sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi warga sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari warga sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

Dalam hal ini penyuluhan dilakukan dengan Peningkatan kapasitas pengetahuan kepada pengurus yayasan sedekah masjid terkait dengan Prinsip dan Mekanisme dalam menjalin sebuah kemitraan.

g Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang digunakan

Berikut rincian anggaran biaya dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan program :

Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya Sumber Dana Bantuan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Infokus	1	Unit	-	-
	Layar Proyektor	1	Unit	-	-
	Jumlah I				575.000,00
2.	Honorarium				
	Fundraiser	2	Orang/Jam	5.00.000,00	1.000.000,00
	Jumlah II				1.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	30	Box	10.000,00	300.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				400.000,00
	Jumlah Keseluruhan				1.975.000,00

h Analisis Kelayakan Program

Berikut analisis kelayakan program dengan menggunakan Teknik Analisis SWOT :

Tabel 7. Analisis SWOT Sumber Dana Bantuan Sosial

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan pihak CSR Perusahaan 2. Kegiatan di dukung oleh pemerintah daerah 3. Partisipan mempunyai antusias yang tinggi 	<p>Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua partisipan paham dengan isi materi
<p>Oppurtunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menerima dana bantuan untuk setiap pelaksanaan program 2. Berkurangnya ketidakseimbangan dana 3. Menciptakan program yang sustainable 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan pihak pihak terkait dalam setiap pelaksanaan program 2. Melakukan bimbingan membuat proposal pengajuan 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian sosialisasi yang dikemas dengan menarik dan menggunakan gaya komunikasi diskusi atau dua arah
<p>Threat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menemukan perusahaan yang cocok 2. Proposal pengajuan bantuan dana ditolak 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta banyak saran kepada fundraiser 2. Pendampingan dalam pengajuan proposal 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat acara yang efektif dan efesian 2. Melakukan Monitoring selama kegiatan dan Evaluasi dari setiap hasil kegiatan

i Jadwal dan Langkah-langkah

Berikut jadwal dan langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

1. Pra pelaksana
 - 1) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
 - 2) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
 - 3) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
 - 4) Praktikan mengundang Fundraiser, Lurah Rancabolang, Ketua RW 10 dan Pekerja Sosial Masyarakat
2. Pelaksanaan
 - 1) Sambutan Oleh Lurah Rancabolang
 - 2) Sambutan Oleh Ketua RW 10
 - 3) Pembacaan Doa oleh Praktikan
 - 4) Pemberian materi terkait Prinsip dan Mekanisme Kemitraan
 - 5) Pemberian materi terkait Pemetaan CSR Perusahaan yang dapat diajak kerjasama
 - 6) Pengulasan materi oleh pekerja sosial masyarakat
 - 7) Penutup
3. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Pendampingan
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Dokumentasi

Tabel 8. Jadwal dan Langkah Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	10.00-10.15	Sambutan Lurah	Sie. Acara	Sambutan oleh Lurah Rancabolang
2.	10.15 – 10.30	Sambutan RW	Sie. Acara	Sambutan oleh ketua RW 10
3.	10.30 – 10.45	Pembacaan doa	Sie. Acara	Pembacaan doa oleh praktikan
4.	10.45 - 12.00	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Prinsip dan mekanisme Kemitraan Pemateri : Fundraiser
5.	12.00 - 12.45	ISOMA	Sie. Konsumsi	Istirahat, sholat zuhur, dan makan siang
6.	12.45-13.00	Ice Breaking	Sie. Acara	-
7.	13.00 - 14.45	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Pemetaan CSR perusahaan yang dapat diajak kerjasama Pemateri : Fundraiser
8.	14.45 -15.00	Pengulangan Materi	Sie. Acara	Pengulangan materi oleh Pekerja Sosial
9	15.00-15.15	Penutup	Sie. Acara	-

C. Analisis Pemberdayaan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Program Buruan Sehat, Alami, Ekonomis (SAE) merupakan program pemberdayaan dengan sistem urban farming yang dirancang oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Program ini pertama kali dibentuk pada bulan September tahun 2020 dimana kondisi pada saat itu sedang mengalami pandemi Covid-19. Buruan SAE bagian dari inovasi Pemkot Bandung yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan ketimpangan pangan yang ada di wilayah Kota Bandung. Konsep daripada program ini adalah pemanfaatan lahan agar menjadi lahan yang produktif melalui kegiatan berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menjadi nilai ekonomis. Program Buruan SAE sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Bandung, salah satunya di Kecamatan Gede Bage, Kelurahan Rancabolang.

Berdasarkan hasil yang ditemui oleh praktikan di lapangan, Kelurahan Rancabolang sendiri telah menjalankan Program Buruan SAE sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat. Fasilitas lahan Buruan SAE di Kelurahan Rancabolang terdapat di masing-masing wilayah, contohnya di wilayah RW 01, RW 05, dan RW 06. Untuk Program Buruan SAE di Kelurahan Rancabolang sendiri dikelola oleh masing-masing Pengurus PKK RW dan di kontrol langsung oleh PKK Kelurahan Rancabolang. Namun realiasi daripada program tersebut terdapat perbandingan terkait dengan kelancaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Seperti contohnya, Program Buruan SAE di wilayah RW 05, dan RW 06 lebih maju dibandingkan dengan Buruan SAE yang ada di wilayah RW 01. Dengan demikian, berangkat dari perbandingan tersebut, praktikan mengambil fokus Program Buruan SAE yang ada di Wilayah RW 01 untuk dianalisis.

Melihat kondisi empiris di lapangan, tidak terealisasinya Program Buruan SAE di Wilayah RW 01. Fasilitas lahan yang dimiliki oleh RW 01 masih berupa lahan kosong. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya Buruan SAE di Wilayah RW 01. Pertama, belum adanya rancangan kegiatan. Kedua, belum ada modal awal untuk belanja kebutuhan. Ketiga, SDM yang belum memadai, dalam hal ini Pengurus PKK RW 01 belum paham terkait dengan teknik perkebunan. Keempat, belum ada pelatihan serta pembinaan yang diberikan kepada Pengurus PKK. Dan yang kelima adalah belum mendapatkan bantuan dari DISPANGTAN berupa alat yang digunakan dan bibit tanaman yang dibutuhkan, mulai dari bibit tanaman, benih, sarana budidaya lele, dan OTG (*Organic Tower Garden*).

Berangkat dari gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi urgensi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kemampuan ataupun keterampilan bagi kelompok PKK dalam mengelola lahan Buruan SAE. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan pelatihan serta bimbingan terkait dengan mekanisme pengelolaan tanaman. Dalam hal ini, tujuannya adalah agar Program Buruan SAE yang ada di Wilayah RW 10 dapat berjalan dengan semestinya dan warga sekitar dapat merasakan hasil daripada Program Buruan SAE tersebut.

2. Tinjauan Konsep

a. Pemberdayaan

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹⁸ Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi

b. Capacity Building

Capacity building secara terminologi dan dari pendapat para ahli agar pemahaman kita menjadi utuh. Menurut Wikipedia, kata “Kapasitas” berasal dari bahasa Belanda; *capaciteit* yang dapat berarti: 1) daya tampung, daya serap, 2) ruang atau fasilitas yang tersedia, 3) kemampuan (maksimal). Hal ini juga sejalan dengan apa yang ditulis di dalam kamusbesar.com bahwa kapasitas dapat berarti: 1) ruang yang tersedia; daya tampung; (nomina), 2) daya serap (panas, listrik, dsb); (nomina), 3) keluaran maksimum; kemampuan berproduksi; (nomina), dan 4) kemampuan kapasitor untuk menghimpun muatan listrik (diukur dalam satuan farad);(nomina).

Para ahli mengatakan, *capacity building* sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan, Brown (2001:25), *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan

multilevel di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada, Morison (2001:42).

c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung sebagai bagian dari Pemerintah Kota Bandung mendukung terwujudnya Kota Bandung sebagai Smart City melalui Visi Terwujudnya Pertanian dan Ketahanan Pangan Yang Tangguh dan Unggul. Dispangtan Kota Bandung merupakan unit yang bertugas merumuskan kebijakan teknis bidang pertanian dan melaksanakan tugas teknis operasional bidang pertanian, yang juga meliputi tanaman pangan, perikanan dan peternakan, yang dijabarkan kedalam 4 (empat) misi, Mengembangkan Potensi Sumber Daya Pertanian Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; Meningkatkan Ketahanan Pangan; Meningkatkan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan; dan Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pertanian.

d. Program Buruan SAE

Buruan Sae adalah sebuah program urban farming terintegrasi yang di galakan oleh dinas pangan dan pertanian (DISPANGTAN) kota Bandung, yang ditujukan untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan yang ada di kota Bandung. melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan yang ada dengan berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri. Buruan yang artinya perkarangan, dan SAE memiliki singkatan Sehat, Alami dan Ekonomi

e. Syarat Pengajuan Program BuruanSAE

Berikut merupakan syarat pengajuan pelaksanaan program buruan sae :

- 1) Membentuk kelompok tani di tingkat RT untuk program Buruan SAE
- 2) Mengajukan kelompok tani untuk Buruan SAE yang telah terbentuk ke DKPP Kota Bandung
- 3) DKPP Kota Bandung akan memberikan pendampingan, bimbingan, dan pembinaan kepada kelompok tani agar sesuai dengan konsep Buruan SAE.
- 4) Dari hasil bimbingan akan diberikan stimulus bantuan untuk mereka memulai Buruan Sae. Mulai dari bibit, benih, sarana budidaya lele di dalam ember, dan OTG (organic tower garden) untuk menanam sayuran di tempat yang sempit.
- 5) Setelah kelompok tani berhasil menjalankan Buruan SAE yaitu menanam sampai panen. DKPP Kota Bandung akan tetap memberikan pendampingan untuk membantu memanfaatkan hasilnya supaya menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih.

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil yang ditemui oleh praktikan di lapangan, Kelurahan Rancabolang sendiri telah menjalankan Program Buruan SAE sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat. Fasilitas lahan Buruan SAE di Kelurahan Rancabolang terdapat di masing-masing wilayah, contohnya di wilayah RW 01, RW 05, dan RW 06. Untuk Program Buruan SAE di Kelurahan Rancabolang sendiri dikelola oleh masing-masing Pengurus PKK RW dan di kontrol oleh PKK Kelurahan Rancabolang. Namun realiasi dari program tersebut terdapat perbandingan terkait dengan kelancaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Seperti contohnya, Program Buruan SAE di wilayah RW 05, dan RW 06 lebih maju dibandingkan dengan Buruan SAE yang ada di wilayah RW 01. Dengan demikian, berangkat dari perbandingan tersebut, praktikan mengambil fokus Program Buruan SAE yang ada di Wilayah RW 01 untuk dianalisis.

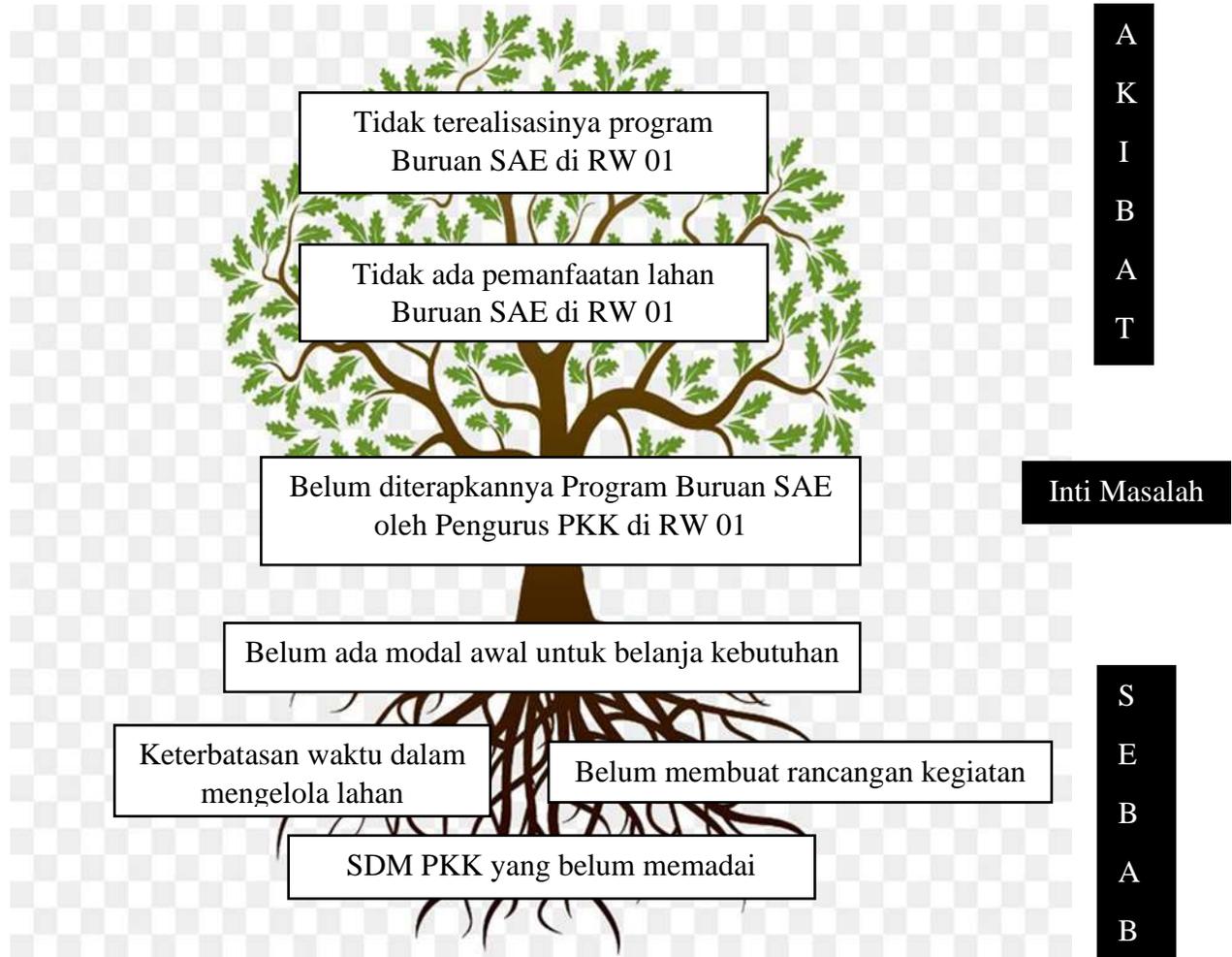
Melihat kondisi empiris di lapangan, tidak terealisasinya Program Buruan SAE di Wilayah RW 01. Fasilitas lahan yang dimiliki oleh RW 01 masih berupa lahan kosong. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya Buruan SAE di Wilayah RW 01. Pertama, belum adanya rancangan kegiatan terkait program tersebut. Kedua, belum ada modal awal untuk belanja kebutuhan. Ketiga, SDM yang belum memadai, dalam hal ini Pengurus PKK RW 01 belum paham terkait dengan teknik pengelolaan tanaman. Keempat, belum ada pelatihan serta pembinaan yang diberikan kepada Pengurus PKK. Dan yang kelima adalah belum mendapatkan bantuan berupa alat yang digunakan dan bibit tanaman yang dibutuhkan, mulai dari bibit, benih, sarana budidaya lele, dan OTG (Organic Tower Garden).

Berangkat dari gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi urgensi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kemampuan ataupun keterampilan bagi kelompok PKK dalam mengelola lahan Buruan SAE. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan pelatihan serta bimbingan terkait dengan mekanisme pengelolaan lahan. Dalam hal ini, tujuannya adalah agar Program Buruan SAE yang ada di Wilayah RW 10 dapat berjalan dengan semestinya dan warga sekitar dapat merasakan hasil daripada Program Buruan SAE tersebut.

b. Analisis Masalah

Berikut analisis sebab dan akibat dari permasalahan yang diangkat :

Gambar 3. Pohon Masalah Pemberdayaan Sosial



c. Fokus Masalah

Berdasarkan gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, praktikan mengambil fokus masalah “Belum diterapkannya Program Buruan SAE oleh Pengurus PKK di RW 01”

d. Penyebab Masalah

Dari hasil analisis sebab akibat dengan menggunakan Metoda dan Teknik Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan penyebab dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- 1) Belum ada modal awal untuk belanja kebutuhan

- 2) Belum membuat rancangan kegiatan
- 3) Keterbatasan waktu dalam mengelola lahan
- 4) SDM PKK yang belum memadai

e. Dampak Masalah

- 1) Tidak Terealisasinya Program Buruan SAE di RW 01
- 2) Tidak ada pemanfaatan lahan Buruan SAE di RW 01

f. Identifikasi Kebutuhan

Berikut apa yang menjadi kebutuhan dari permasalahan yang diangkat :

- 1) Kebutuhan akan peningkatan kapasitas pengetahuan dalam pengelolaan lahan
- 2) Kebutuhan akan pelatihan keterampilan sebagai peningkatan kapasitas kemampuan
- 3) Menjadikan Buruan SAE sebagai program pengembangan masyarakat yang dapat dirasakan oleh warga sekitar

g. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan :

- 1) Kelurahan Rancabolang
 Dalam hal ini pihak kelurahan dapat memfasilitasi warga dalam pengajuan bantuan Buruan SAE kepada DISPANGTAN Kota Bandung
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung
 Dalam hal ini DISPANGTAN dapat membantu memberikan pelatihan dan pembinaan serta memenuhi kebutuhan dari setiap kegiatan Buruan SAE yang ada di RW 01

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Berangkat dari gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi urgensi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas kemampuan ataupun keterampilan bagi kelompok PKK dalam mengelola lahan Buruan SAE. Maka dari itu, dalam merespon permasalahan tersebut, praktikan berinisiatif untuk merancang suatu rencana intervensi sebagai alternatif pemecahan masalah. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan serta bimbingan terkait dengan mekanisme pengelolaan lahan. Dalam hal ini, tujuannya adalah agar Program Buruan SAE yang ada di Wilayah RW 10 dapat berjalan dengan semestinya dan warga sekitar dapat merasakan hasil daripada Program Buruan SAE tersebut.

b. Nama Program

Program “Pelatihan Peningkatan Kapasitas kepada Pengurus PKK RW 01 dalam mengelola lahan Buruan SAE”.

c. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas SDM Pengurus PKK RW 01 serta merealisasikan pelaksanaan Program Buruan SAE di wilayah RW 01

2. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan kapasitas pengetahuan serta kemampuan kepada Pengurus PKK dalam mengelola lahan
- 2) Meningkatkan pembinaan serta pendampingan
- 3) Memfasilitasi Pengurus PKK RW 01 dalam pengajuan dana bantuan Buruan SAE kepada DISPANGTAN

d. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dengan memberikan pelatihan serta bimbingan kepada Pengurus PKK Rw 01 terkait dengan mekanisme pengelolaan lahan secara langsung di lahan Buruan SAE, sekaligus mengisi lahan yang masih kosong.

e. Sistem Partisipan

Berikut adalah sistem partisipan yang nantinya akan terlibat dalam kegiatan Program :

Tabel 9. Sistem Partisipan Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Praktikan
2.	Change Agent System	a. Pekerja Sosial Masyarakat b. DISPANGTAN Kota Bandung
3.	Client System	Pengurus PKK RW 01
4.	Support System	a. Kecamatan Gedebage b. Kelurahan Rancabolang c. Pekerja Sosial Masyarakat d. DISPANGTAN Kota Bandung
5.	Controlling System	Pekerja Sosial Masyarakat
6.	Implementing System	a. Pekerja sosial Masyarakat b. DISPANGTAN Kota Bandung
7.	Target System	a. Pengurus PKK RW 01 b. Lahan Buruan SAE RW 01
8.	Action System	a. Pekerja Sosial Masyarakat b. DISPANGTAN Kota Bandung

f. Metoda dan Teknik

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau “*Community Organization dan Community Development*”, yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini Pengurus PKK RW 01 mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, memanfaatkan potensi sumber di lingkungannya, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya. Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) Community Development

Praktikan memilih menggunakan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* karena pengorganisasi masyarakatan (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat (CD) merupakan upaya yang dilakukan oleh professional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri.

2) Capacity Building

Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait pengelolaan lahan buruan sae dengan melaksanakan pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait.

3) Penyuluhan

Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

g. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang digunakan

Berikut rencana anggaran biaya dan alat yang digunakan dalam kegiatan Program :

Tabel 10. Rancangan Anggaran Biaya Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Banner kegiatan Pelatihan	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				275.000,00
2	Konsumsi				
	Snack peserta	12	Box	10.000,00	120.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack lain-lain	30	Box	10.000,00	300.000,00
	Jumlah II				500.000,00
	Jumlah Keseluruhan				775.000,00

h. Analisis Kelayakan Program

Berikut analisis kelayakan program dengan menggunakan Metode Analisis SWOT :

Tabel 11. Analisis SWOT Pemberdayaan Sosial

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan DISPANGTAN Kota Bandung 2. Kegiatan di dukung oleh pemerintah daerah 3. Partisipan mempunyai antusias yang tinggi 	<p>Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua partisipan ikut serta ke dalam kegiatan
<p>Oppurtunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia Pengurus PKK 2. Berjalannya Program Buruan SAE di RW 01 3. Menjadi Program yang Sustain 4. Dapat menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampinmgan yang berkelanjutan dengan cara monitoring 2. Melibatkan Kelompok Tani dalam pengelolaan Buruan SAE 3. Melakukan riset mendalam tentang pengembangan program 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan waktu kegiatan dari jauh hari 2. Membuat Timeline Kegiatan
<p>Threat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlaksananya Program pelatihan peningkatan kapasitas kepada pengurus pkk rw 01 dalam mengelola lahan buruan sae 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Prosedur pelaksanaan Program serta indikator keberhasilan program 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan informasi terkait dengan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan 2. Melakukan evaluasi dari hasil kegiatan

i. Jadwal dan Langkah-langkah

Berikut jadwal dan langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

1. Pra pelaksana
 - 1) Praktikan memfasilitasi Pengurus PKK RW 01 dalam Pengajuan Dana Program Bantuan Buruan SAE kepada DISPANGTAN
 - 2) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
 - 3) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
 - 4) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
 - 5) Praktikan mengundang Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Camat Gedebage, Lurah Rancabolang, dan Pekerja Sosial Masyarakat
2. Pelaksanaan
 - 1) Sambutan oleh Camat Gede bage dan Lurah Rancabolang
 - 2) Pembacaan Doa oleh Praktikan
 - 3) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial Masyarakat sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan
 - 4) Pemberian materi terkait mekanisme mengelola lahan oleh DISPANGTAN Kota Bandung, mulai dari cara menanam dan menjelaskan jenis-jenis sektor yang dapat diisi
 - 5) Pembentukan Tim Kerja Tambahan oleh Pekerja Sosial
 - 6) Melakukan pelatihan mengisi lahan secara langsung di lahan Buruan SAE kepada partisipan dan dipandu oleh Pekerja Sosial dan DISPANGTAN Kota Bandung
 - 7) Pemberian materi terkait pengembangan lahan Buruan SAE oleh DISPANGTAN Kota Bandung
 - 8) Pembentukan Tim penanggung jawab pengelola Buruan SAE dengan melibatkan kelompok tani
 - 9) Penutup
3. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Pendampingan
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Dokumentasi Sebagai Bukti Kegiatan

Tabel 12. Jadwal dan Langkah Analisis Pemberdayaan Sosial

	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan Camat	Sie. Humas	Sambutan Oleh Camat Gede Bage
2.	08.15 - 08.30	Sambutan Lurah	Sie. Humas	Sambutan Oleh Lurah Rancabolang
3.	08.30 - 08.45	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
4.	08.45 - 09.00	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
5.	09.00 - 09.45	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi : Tata cara menanam dan jenis-jenis sektor yang dapat diisi Pemateri : DISPANGTAN Kota Bandung
6.	09.45 - 10.00	Pembentukan Tim Kerja	Sie. Acara	Pembentukan Tim kerja tambahan Pemandu : .Pekerja Sosial Masyarakat
7.	10.00 - 12.00	Pelatihan	Sie. Acara	Pelatihan Menanam di Lahan Buruan SAE Pemandu : DISPANGTAN Kota Bandung
8.	12.00 - 13.00	ISHOMA	Sie. Konsumsi	Istirahat, Solat, dan Makan

9.	13.15 - 14.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Pengembangan Lahan Buruan SAE Pemateri : DISPANGTAN Kota Bandung
10.	14.00 - 15.00	Pembentukan Tim Penanggung Jawab	Sie. Acara	Pembentukan Tim Penanggung Jawab dalam pengelolaan lahan Buruan SAE Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
11.	15.00 - 15.15	Penutup	Sie. Acara	-

D. Analisis Penataan Lingkungan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Air bersih dan sanitasi layak merupakan bagian dari salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup, yang artinya memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwasanya capaian akses air bersih yang layak saat ini di Indonesia mencapai 72,55%. Artinya angka ini masih dibawah target SDGS yang seharusnya sebesar 100%, dan masih terdapat 33 juta penduduk di indonesia yang kesulitan dalam mengakses air bersih.

Melihat kondisis sosial objektif di lapangan, permasalahan kualitas air bersih dirasakan oleh warga RW 01 kelurahan rancabolang. Dalam penggunaan akses untuk mendapatkan air bersih, terdapat sebagian warga yang merasakan fasilitas air bersih dan sebagiannya lagi tidak merasakan daripada fasilitas tersebut. Untuk warga yang tidak merasakan fasilitas air bersih, mereka menggunakan teknologi sumur bor, dimana kualitas air yang diperoleh dari sumur bor tersebut belum memenuhi standar kualitas yang seharusnya seperti kualitas air yang bau, kotor dan tidak aman untuk digunakan sehingga hal ini dikhawatirkan berdampak juga bagi keberlanjutan hidup mereka khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan ketua rw, fasilitas air bersih yang ada di wilayah RW 01 itu awalnya merupakan bagian dari

bantuan pemerintah daerah setempat. Untuk penempatan fasilitas air bersih tersebut hanya berdasarkan lahan yang memungkinkan untuk digunakan, dan bukan berdasarkan lahan yang strategis untuk di akses. Artinya disini adalah adanya ketidakseimbangan pembangunan dan tata kelola yang ada di wilayah RW 01. Minimnya keterbatasan akses dan tidak meratanya fasilitas, menimbulkan adanya kesenjangan dan kecemburuan dalam kehidupan sosialnya.

Berangkat dari gambaran umum masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi urgensi dari permasalahan tersebut adalah perlu adanya pemerataan fasilitas air bersih di lingkungan RW 01. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan pelatihan serta bimbingan terkait dengan mekanisme pembuatan teknologi filter air yang praktis sebagai solusi alternatif dalam pemecahan persoalan tersebut.

2. Tinjauan Konsep

a Penataan Lingkungan

Penataan lingkungan merupakan proses pengelompokan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan fungsinya. Dalam Undang Undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang/lingkungan memiliki tujuan:

- 1) terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan,
- 2) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya,
- 3) tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Penataan lingkungan dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan berdaya guna.

Penataan lingkungan hidup yang baik akan terpelihara kualitas lingkungan. Berdasarkan fungsi utama kawasan, penataan lingkungan hidup dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) kawasan lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contoh: hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan cagar alam, dan sebagainya.
- 2) kawasan budi daya, yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Contoh: lahan budi daya jagung, kayu, sawah, dan lain-lain.

Berdasarkan kegiatan utamanya, penataan lingkungan hidup terdiri dari 3 kawasan, yaitu:

1. Kawasan perdesaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam.
2. Kawasan perkotaan, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
3. Kawasan tertentu, adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

b Sustainable Development Goals

SDGS sendiri merupakan rencana pembangunan yang berkelanjutan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tujuan SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial

c Air bersih dan Sanitasi layak

Air bersih dan sanitasi layak merupakan tujuan ke-6 dari 17 tujuan *SDGs*. Tujuan dari target ini adalah untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

d Kriteria air bersih

Kriteria air bersih yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki rasa
- 2) Tidak memiliki bau
- 3) Jernih
- 4) Memiliki pH netral
- 5) Tidak mengandung zat kimia berlebih
- 6) Tidak mengandung bakteri

e Sanitasi air

Sanitasi air didefinisikan sebagai proses pembersihan dan penjernihan air sehingga aman untuk digunakan. Air bersih adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup yang tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di Bumi.

3. Asesmen

a Identifikasi Masalah

Melihat kondisi sosial objektif di lapangan, permasalahan kualitas air bersih dirasakan oleh warga rw 01 kelurahan rancabolang. Dalam penggunaan akses untuk

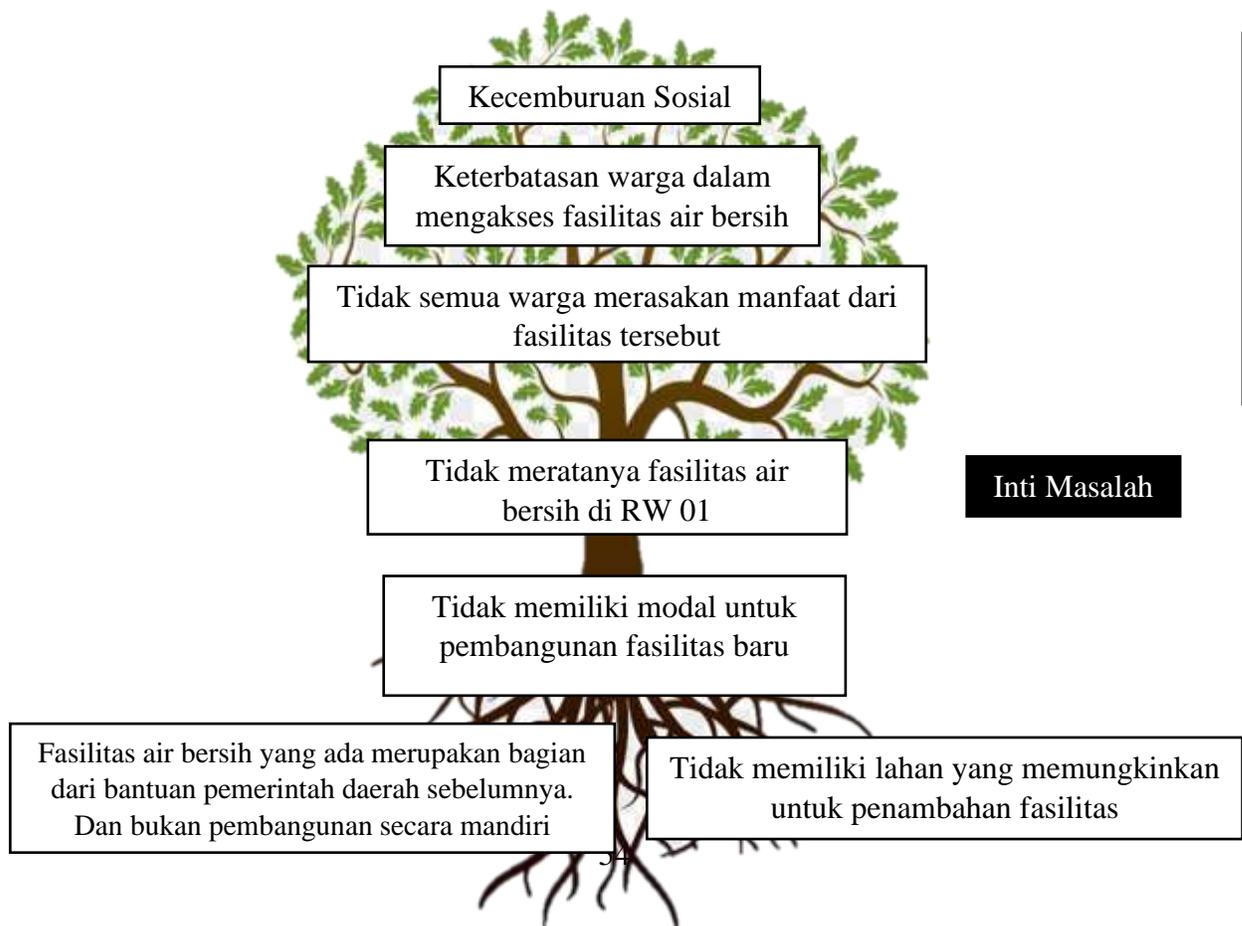
mendapatkan air bersih, terdapat sebagian warga yang merasakan fasilitas air bersih dan sebagiannya lagi tidak merasakan daripada fasilitas tersebut. Untuk warga yang tidak merasakan fasilitas air bersih, mereka menggunakan teknologi sumur bor, dimana kualitas air yang diperoleh dari sumur bor tersebut belum memenuhi standar kualitas yang seharusnya seperti kualitas air yang bau, kotor dan tidak aman untuk digunakan sehingga hal ini dikhawatirkan berdampak juga bagi keberlanjutan hidup mereka khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan ketua rw, fasilitas air bersih yang ada di wilayah rw 01 itu awalnya merupakan bagian dari bantuan pemerintah daerah setempat. Untuk penempatan fasilitas air bersih tersebut hanya berdasarkan lahan memungkinkan untuk digunakan, dan bukan berdasarkan lahan yang strategis untuk di akses. Artinya disini adalah adanya ketidakseimbangan pembangunan dan tata kelola yang ada di wilayah rw 01. Minimnya keterbatasan akses dan tidak meratanya fasilitas, menimbulkan adanya kesenjangan dan kecemburuan dalam kehidupan sosialnya.

b Analisis Masalah

Berikut analisis sebab akibat dengan menggunakan teknik analisis pohon masalah :

Gambar 4. Pohon Masalah Penataan Lingkungan Sosial



c Fokus Masalah

Berdasarkan gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, praktikan mengambil fokus masalah “Tidak Meratanya Fasilitas Air bersih di wilayah RW 01”

d Penyebab Masalah

Dari hasil analisis sebab akibat dengan menggunakan Metoda dan Teknik Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan penyebab dari masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

- 1) Fasilitas air bersih yang ada merupakan bagian dari bantuan pemerintah daerah setempat sebelumnya, dan bukan merupakan pembangunan secara mandiri
- 2) Tidak memiliki modal untuk pembangunan fasilitas baru
- 3) Tidak memiliki lahan yang memungkinkan untuk penambahan fasilitas

e Dampak Masalah

Dampak dari permasalahan “Tidak Meratanya fasilitas air bersih di RW 01” adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kecemburuan sosial
- 2) Keterbatasan warga dalam mengakses fasilitas air bersih
- 3) Tidak semua warga dapat merasakan manfaat dari fasilitas tersebut

f Identifikasi Kebutuhan

Berikut apa yang menjadi kebutuhan dari permasalahan yang diangkat :

- 1) Kebutuhan akan mendapatkan akses air bersih
- 2) Kebutuhan akan pemerataan fasilitas air bersih
- 3) Kebutuhan akan solusi alternatif dalam mendapatkan akses air bersih

g Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut Potensi dan Sumber yang dapat dimanfaatkan :

- 1) Kelurahan rancabolang, Dalam hal ini pihak kelurahan dapat memfasilitasi warga dalam pengajuan bantuan Fasilitas kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
- 2) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dalam hal ini dinas lingkungan hidup kota bandung dapat memberikan pembangunan fasilitas baru kepada warga RW 01
- 3) Tenaga Ahli, dalam hal ini tenaga ahli dapat memberikan pelatihan kepada warga RW 01 terkait dengan pembuatan teknologi filtrasi air

4. Rencana Intervensi

a Latar belakang

Melihat kondisi sosial objektif di lapangan, permasalahan kualitas air bersih dirasakan oleh warga rw 01 kelurahan rancabolang. Dalam penggunaan akses untuk mendapatkan air bersih, terdapat sebagian warga yang merasakan fasilitas air bersih dan sebagiannya lagi tidak merasakan daripada fasilitas tersebut. Untuk warga yang tidak merasakan fasilitas air bersih, mereka menggunakan teknologi sumur bor, dimana kualitas air yang diperoleh dari sumur bor tersebut belum memenuhi standar kualitas yang seharusnya seperti kualitas air yang bau, kotor dan tidak aman untuk digunakan sehingga hal ini dikhawatirkan berdampak juga bagi keberlanjutan hidup mereka khususnya di bidang kesehatan.

Berangkat dari gambaran umum masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menjadi urgensi dari permasalahan ini adalah perlu adanya pemerataan fasilitas air bersih di wilayah RW 01. Maka dari itu, dalam merespon permasalahan tersebut, praktikan berinisiatif untuk merancang suatu rencana intervensi sebagai alternatif pemecahan masalah. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan bisa dengan memberikan pelatihan serta bimbingan terkait dengan mekanisme pembuatan teknologi filter air yang praktis sebagai solusi alternatif.

b Nama Program

Program “Sosialisasi dan Pelatihan pembuatan teknologi filter air yang praktis”

c Tujuan umum dan tujuan khusus

1. Tujuan umum

Memberikan inovasi dan wawasan baru kepada warga serta meningkatkan akses penggunaan air bersih secara merata di wilayah RW 01

2. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan kapasitas kemampuan dalam pembuatan filter air sebagai solusi alternatif
- 2) Meningkatkan kapasitas pengetahuan tentang penggunaan dan pemeliharaan alat
- 3) Meningkatkan pendampingan dan pendampingan kepada warga RW 01

d Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan nantinya dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga RW 01 melalui bentuk kegiatan sosialisasi tentang pengenalan teknologi filter air yang praktis untuk digunakan serta pelatihan pembuatan teknologi filter air.

e **Sistem partisipan**

Tabel 13. Sistem Partisipan Analisis Penataan Lingkungan Sosial

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agent System	a. Pekerja sosial b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung c. Tenaga Ahli
3.	Client System	Warga rw 01 yang tidak mendapatkan akses fasilitas air bersih
4.	Support System	a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung b. Kelurahan rancabolang
5.	Controlling System	a. Pekerja Sosial b. Ketua RW 01 c. Kelurahan Rancabolang
6.	Implementing System	a. Pekerja sosial b. Dinas lingkungan hidup kota bandung
7.	Target System	a. Warga RW 01 b. Kecamatan Gedebage c. Kelurahan Rancabolang
8.	Action System	a. Pekerja Sosial b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

f Metoda dan Teknik yang digunakan

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau “Community Organization dan Community Development”, yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini Warga RW 01 mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, memanfaatkan potensi sumber di lingkungannya, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya. Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) *Community Development*

Praktikan memilih menggunakan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* karena pengorganisasi masyarakatan (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat (CD) merupakan upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri.

2) *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait pembuatan filter air dengan melaksanakan pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait

3) Penyuluhan

Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

g Rancangan Anggaran Biaya dan Alat yang digunakan

Tabel 14. Rancangan Anggaran Biaya Analisis Penataan Lingkungan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				575.000,00
2.	Honorarium				
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	2	Orang/Jam	9.00.000,00	1.800.000,00
	Tenaga Ahli	2	Orang/Jam	5.00.000,00	1.000.000,00
	Jumlah II				2.800.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	20	Box	10.000,00	200.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				300.000,00
	Jumlah Keseluruhan				3.675.000,00

h Analisis kelayakan program

Tabel 15. Analisis Kelayakan Program Analisis Penataan Lingkungan Sosial

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya pelaksana 2. Melibatkan stakeholder 3. Mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah daerah 	<p>Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sdm partisipan tidak memadai dalam memahami materi dan pelatihan
<p>Oppurtunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan warga rw 01 dalam pembuatan teknologi filter air alternatif 2. Meratanya akses air bersih di rw 01 3. Semua warga dapat merasakan kualitas air bersih 4. Tidak adanya kecemburuan sosial 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait 2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program 3. Melakukan riset pengembangan program 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengulangan materi yang disampaikan kepada partisipan
<p>Threat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat filtrasi air tidak mampu bertahan lama 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan secara berkelanjutan 2. Membentuk tim penanggung jawab 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat prosedur terkait dengan pemakaian alat

i Jadwal dan langkah-langkah kegiatan

Berikut jadwal dan langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

1. Pra pelaksana
 - 1) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
 - 2) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
 - 3) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
 - 4) Praktikan mengundang Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Camat Gedebage, Lurah Rancabolang, Tenaga Ahli, dan Pekerja Sosial Masyarakat
2. Pelaksanaan
 - 1) Sambutan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
 - 2) Sambutan oleh Camat Gedebage
 - 3) Sambutan oleh Lurah Rancabolang
 - 4) Pembacaan Doa oleh Praktikan
 - 5) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial Masyarakat sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan
 - 6) Pemberian materi terkait pentingnya air bersih untuk keberlanjutan hidup khususnya di bidang kesehatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
 - 7) Pemberian Materi terkait Pengenalan teknologi filter air yang dapat digunakan dan mekanisme pembuatannya
 - 8) Pelatihan pembuatan teknologi filtrasi air oleh tenaga ahli
 - 9) Pembentukan tim pengelolaan
 - 10) Penutup
3. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Pendampingan
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Dokumentasi Sebagai Bukti Kegiatan

Tabel 16. Jadwal dan Langkah Analisis Penataan Lingkungan Sosial

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan 1	Sie. Humas	Sambutan Oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
2.	08.15 - 08.30	Sambutan 2	Sie. Humas	Sambutan Oleh Camat Gedebage
3.	08.30 – 08.45	Sambutan 3	Sie. Humas	Sambutan oleh Lurah Rancabolang
4.	08.45 - 09.00	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
5.	09.00 - 09.15	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan oleh Pekerja Sosial Masyarakat
6.	09.00 - 09.45	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Pentingnya air bersih bagi kesehatan Pemateri : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
7.	10.00 - 12.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Pengenalan teknologi filtrasi air dan mekanisme pembuatannya Pemateri :Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
8.	12.00 - 12.45	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
9.	12.00 - 13.00	Pelatihan	Sie. Acara	Pelatihan pembuatan filtrasi air oleh tenaga ahli
10.	13.15 - 14.00	Pembentukan Tim Pengelolaan	Sie. Acara	Pemandu : Pekerja Sosial Masyarakat
11.	14.00 - 14.15	Penutup	Sie. Acara	-

E. Analisis Penanggulangan Bencana

1. Gambaran Umum Masalah

Bencana gempa bumi rentan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap bencana masih relatif rendah. Kejadian bencana yang berulang-ulang seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Namun dengan demikian, sebuah bencana lebih dianggap sebagai takdir Tuhan, sehingga mereka akan pasrah dalam menghadapi bencana. Padahal dalam kenyataannya, bencana dapat dicegah dan kemunculannya dapat dideteksi melalui tanda-tanda

Kesiapsiagaan terhadap terjadinya suatu bencana alam merupakan hal yang penting dan harus dibangun pada setiap kelompok di masyarakat. Risiko tertimpanya bencana alam dapat diminimalisir oleh setiap orang jika semua orang telah siap menghadapi bencana tersebut. Terdapat tiga tahapan dalam pengurangan risiko bencana diantaranya, Prabencana, Saat bencana, dan Pasca Bencana. Kegiatan untuk mengurangi dampak dari risiko bencana tersebut dinamakan sebagai mitigasi bencana. Mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi sering disebut pencegahan atau pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana..

Kota Bandung termasuk ke dalam daerah yang rentan terjadinya gempa bumi karena wilayahnya yang berdekatan dengan Gunung Merapi yaitu Gunung Tangkuban Perahu, dan patahan Sesar Lembang. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dengan Gunung Merapi dan Sesar Lembang, tetap saja bencana dapat datang kapan saja dan berdampak kepada siapa saja.

Melihat kondisi sosial objektif, di Kelurahan Rancabolang, terdapat suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau biasa disebut jompo. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pengurus LKS LU bahwasanya pemahaman Pengurus LKS LU terhadap manajemen risiko penanggulangan bencana gempa bumi masih relatif rendah. Dengan demikian, apabila terjadinya suatu bencana gempa bumi maka pengurus LKS LU tersebut tidak memahami mitigasi yang dapat dilakukan. Artinya ini akan berdampak juga kepada lansia yang berada di LKS LU tersebut. Lansia sendiri merupakan bagian dari kelompok yang rentan terkena segala permasalahan, hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah lemah.

Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan sebelumnya, urgensi dari permasalahan ini adalah perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan kepada pengurus LKS LU terkait dengan manajemen risiko penanggulangan bencana. Dengan demikian, salah satu tujuannya adalah untuk dapat melindungi lansia yang berada di LKS LU tersebut.

2. Tinjauan Konsep

a Pengertian Bencana

Berdasarkan UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, unsur yang terkait langsung atau terpengaruh harus merespons dengan melakukan tindakan luar biasa guna menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti semula atau menjadi lebih baik (Arie Priambodo, 2009: 22)

b Manajemen Penanggulangan Bencana

Tyas (2016) dalam Rofifah (2019) menyebutkan bahwa manajemen penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana sesuai pada siklus bencana. Siklus bencana dibagi menjadi tiga diantaranya fase pra bencana disebut sebagai fase kesiapsiagaan yang terdiri atas pencegahan dan mitigasi (prevention and mitigation), fase bencana disebut sebagai fase tanggap darurat (response) yang terdiri atas fase akut (acute phase) serta fase sub akut (sub acute phase) dan yang terakhir adalah fase pasca bencana atau biasa disebut sebagai fase rekonstruksi yang terdiri dari fase pemulihan atau perbaikan (recovery phase) dan fase rehabilitasi atau rekonstruksi (rehabilitation or reconstruction phase).

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah aktivitas serta yang diambil sebelum bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak dari bencana, contohnya berupa memberikan peringatan dini yang tepat dan efektif serta dengan mengevakuasi penduduk dan harta benda dari lokasi yang terancam. Beberapa kegiatan kesiapsiagaan meliputi :

- 1) Peringatan dini Sebagai pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 2) Mitigasi (mitigation) Langkah struktural dan non struktural yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.
- 3) Tahap tanggap darurat merupakan tindakan atau pengerahan pertolongan

untuk membantu masyarakat atau komunitas yang mengalami bencana, guna mengantisipasi bertambahnya korban jiwa. dari sudut pandang pelayanan medis, bencana terbagi menjadi “fase akut” dan “fase sub akut”. Pada fase akut, 48 jam pertama sejak kejadian bencana dinamakan “fase penyelamatan dan pertolongan/pelayanan medis darurat” kegiatan yang dilakukan adalah penyelamatan dan pertolongan baik berupa tindakan medis darurat terhadap korban luka. Satu minggu setelah terjadinya bencana disebut dengan “fase sub akut” kegiatan yang dilakukan adalah perawatan terhadap orang-orang yang terluka pada saat mengungsi atau dievakuasi, serta dilakukan intervensi terhadap munculnya permasalahan kesehatan selama dalam pengungsian.

- 4) Tahap pemulihan berupa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kepada kondisi normal. Tahap rekonstruksi merupakan tahap yang bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana

c Bencana Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah guncangan akibat adanya gerakan, geseran, maupun patahan lapisan batuan didalam bumi (Departemen Komunikasi dan Informasi RI, 2008: 7). 35 Menurut Joko Christanto (2011: 11), Gempa Bumi terjadi karena gesekan antar lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Pergesekan ini mengeluarkan energi yang luar biasa besar dan menimbulkan guncangan di permukaan.

d Jenis-jenis gempa bumi

Berikut jenis-jenis gempa bumi berdasarkan dari penyebabnya :

- 1) Gempa Bumi Tektonik
gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik yang berupa pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar.
- 2) Gempa Bumi Vulkanik
Gempa bumi runtuh adalah gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya atap gua atau daerah kosong dibawah lahan mengalami keruntuhan, runtuhnya atap tambang, runtuhnya tanah, runtuhnya batuan, dan sebagainya.
- 3) Gempa Bumi Tumbukan
Gempa bumi tumbukan terjadi sebagai akibat jatuhnya asteroid ke bumi.
- 4) Gempa Bumi Buatan
Gempa bumi buatan terjadi karena ulah manusia itu sendiri, seperti peledak dinamit, nuklir, dan bom dengan kekuatan yang sangat besar

3. Aesemen

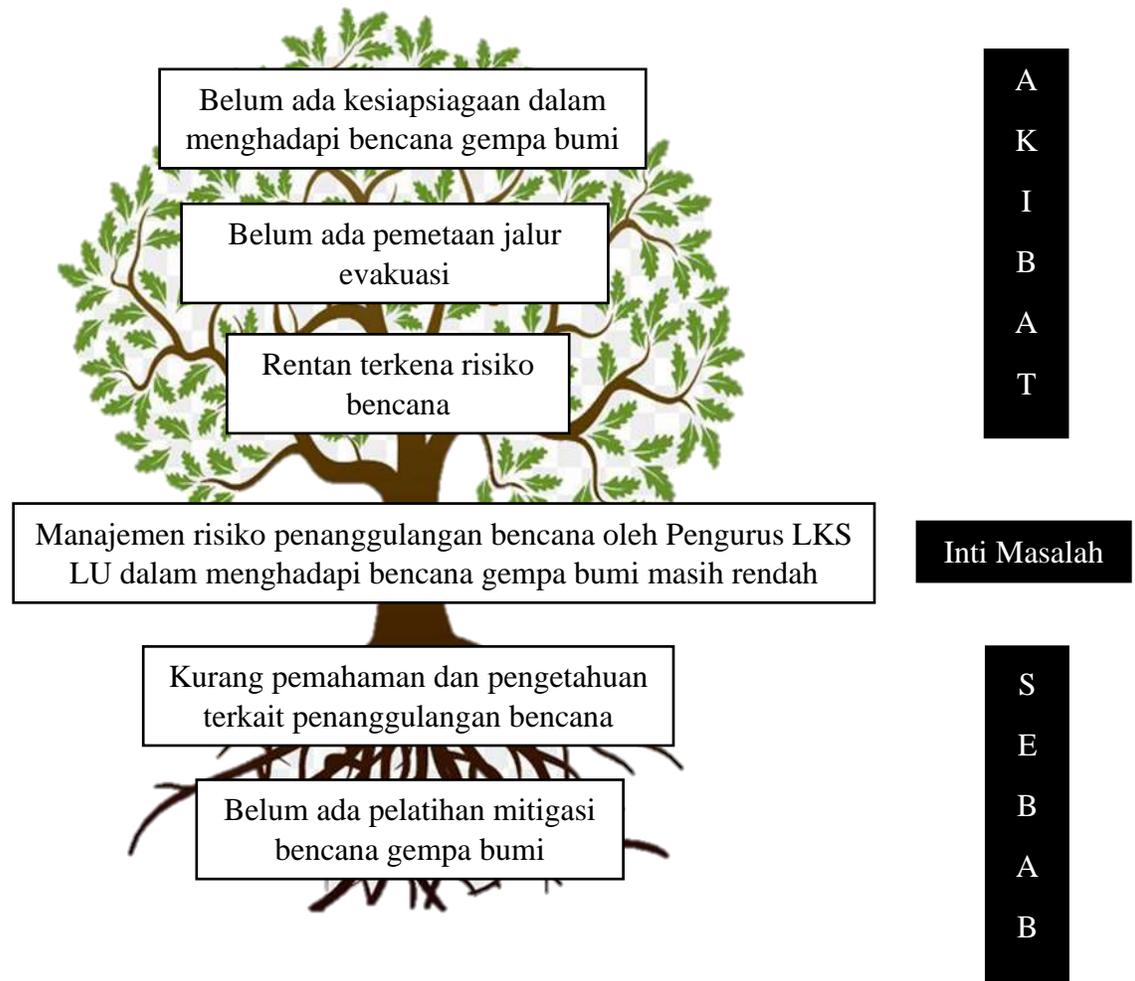
a Identifikasi masalah

Melihat kondisi sosial objektif, di Kelurahan Rancabolang, terdapat suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau biasa disebut jompo. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pengurus LKS LU bahwasanya pemahaman Pengurus LKS LU terhadap manajemen risiko penanggulangan bencana gempa bumi masih relatif rendah. Dengan demikian, apabila terjadinya suatu bencana gempa bumi maka pengurus LKS LU tersebut tidak memahami tentang mitigasi yang dapat dilakukan. Artinya ini akan berdampak juga kepada lansia yang berada LKSU tersebut. Lansia sendiri merupakan bagian dari kelompok yang rentan terkena segala permasalahan, hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah lemah.

Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan sebelumnya, urgensi dari permasalahan ini adalah perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan kepada pengurus lks lu terkait dengan manajemen risiko penanggulangan bencana. Dengan demkian, salah satu tujuannya adalah untuk dapat melindungi lansia yang berada di lks lu tersebut

b Analisis masalah

Gambar 5. Pohon Masalah Penanggulangan Bencana



c Fokus masalah

Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan sebelumnya, praktikan mengambil fokus masalah “Manajemen risiko penanggulangan bencana oleh Pengurus LKS LU masih rendah”

d Penyebab masalah

Adapun penyebab dari masalah yang diangkat sebagai berikut :

- 1) Pengurus LKS LU kurang pemahaman dan pengetahuan terkait penanggulangan bencana
- 2) Belum ada pelatihan mitigasi bencana gempa bumi yang diberikan kepada pengurus LKS LU

e Dampak masalah

Dampak dari permasalahan “Manajemen risiko penanggulangan bencana oleh Pengurus LKS LU masih rendah” adalah sebagai berikut :

- 1) Belum ada kesiapsiagaan Pengurus LKS LU dalam menghadapi bencana gempa bumi
- 2) Rentan terkena risiko bencana gempa bumi
- 3) Belum ada pemetaan jalur evakuasi

f Identifikasi kebutuhan

Berikut apa yang menjadi kebutuhan dari permasalahan yang diangkat :

- 1) Kebutuhan akan pengetahuan terkait bencana gempa bumi
- 2) Kebutuhan akan pemahaman tentang mitigasi bencana gempa bumi
- 3) kebutuhan akan pemetaan jalur evakuasi dalam meminimalisir risiko bencana gempa bumi

g Identifikasi potensi dan sumber

Berikut potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan :

- 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Dalam hal ini BPBD dapat memberikan pemahaman kepada pengurus LKS LU terkait dengan bencana gempa bumi dan mitigasi dari bencana tersebut
- 2) Taruna Siaga Bencana
Dalam hal ini TAGANA dapat memberikan pelatihan mitigasi bencana gempa bumi kepada Pengurus LKS LU

4. Rencana Intervensi

a Latar Belakang

Melihat kondisi sosial objektif, di Kelurahan Rancabolang, terdapat suatu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia atau biasa disebut jompo. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pengurus LKS LU bahwasanya pemahaman Pengurus LKS LU terhadap manajemen risiko penanggulangan bencana gempa bumi masih relatif rendah. Dengan demikian, apabila terjadinya suatu bencana gempa bumi maka pengurus LKS LU tersebut tidak memahami tentang mitigasi yang dapat dilakukan. Artinya ini akan berdampak juga kepada lansia yang berada LKSU tersebut. Lansia sendiri merupakan bagian dari kelompok yang rentan terkena segala permasalahan, hal ini dikarenakan kondisi fisiknya yang sudah lemah.

Berdasarkan gambaran umum yang telah dijelaskan sebelumnya, urgensi dari permasalahan ini adalah perlu adanya peningkatan kapasitas pengetahuan kepada pengurus lks lu terkait dengan manajemen risiko penanggulangan bencana. Dengan demikian, salah satu tujuannya adalah untuk dapat melindungi lansia yang berada di lks lu tersebut

b Nama Program

Progam “Peningkatan Manajemen Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Kepada Pengurus LKS LU Fakku Raqabah”

c Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Meningkatkan kesiapsiagaan Pengurus LKS LU dalam meminimalisir risiko tertimpa nya bencana gempa bumi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

2. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman Pengurus LKS LU dalam penanggulangan bencana
- 2) Meningkatkan pelatihan mitigasi bencana gempa bumi kepada Pengurus LKS LU
- 3) Pengurus LKS LU dapat mengetahui langkah-langkah awal dan jalur Evakuasi saat terjadi bencana

d Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan nantinya adalah memberikan pengetahuan tentang penanggulangan bencana gempa bumi melalui penyuluhan sosial, memberikan pelatihan mitigasi dengan cara simulasi bencana, membentuk jalur evakuasi dan membentuk tim siaga bencana di LKS LU Fakku Raqabah

e Sistem Partisipan

Tabel 17. Sistem Partisipan Penanggulangan Bencana

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja sosial
2.	Change Agent System	a. Pekerja sosial b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) c. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
3.	Client System	Pengurus LKS LU
4.	Support System	a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah b. Taruna Siaga Bencana c. Kelurahan Rancabolang
5.	Controlling System	a. Pekerja Sosial b. Ketua Pengurus LKS LU Faku Raqabah
6.	Implementing System	a. Pekerja sosial b. BPBD c. TAGANA
7.	Target System	a. LKS LU b. Kelurahan Rancabolang
8.	Action System	a. Pekerja Sosial b. BPBD c. TAGANA

f Metoda dan Teknik yang digunakan

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau “Community Organization dan Community Development”, yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini Pengurus LKS LU mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, memanfaatkan potensi sumber di lingkungannya, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya. Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1. Community Development

Praktikan memilih menggunakan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* karena pengorganisasi masyarakatan (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat (CD) merupakan upaya yang dilakukan oleh professional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri.

2. Capacity Building

Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait mitigasi bencana gempa bumi dengan melaksanakan pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait

3. Penyuluhan

Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial

g Rancangan dan Anggaran Biaya dan Alat yang digunakan

Tabel 18. Rancangan dan Anggaran Biaya Penanggulangan Bencana

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sound System	2	Unit	150.000,00	300.000,00
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Jumlah I				575.000,00
2.	Honorarium				
	BPBD	2	Orang/Jam	9.00.000,00	1.800.000,00
	TAGANA	12	Orang/Jam	2.00.000,00	2.400.000,00
	Jumlah II				4.200.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	32	Box	10.000,00	320.000,00
	Snack panitia	10	Box	10.000,00	100.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				300.000,00
	Jumlah Keseluruhan				5.075.000,00

h Analisis Kelayakan Program

Tabel 19. Analisis Kelayakan Program Penanggulangan Bencana

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya pelaksana 2. Kegiatan didukung oleh BPBD dan TAGANA 3. Partsipan aktif dalam kegiatan 	<p>Weakness :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurus LKS LU sedikit yang memiliki usia produktif
<p>Oppurtunities :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemampuan Mitigasi bencana Pengurus LKS LU 2. Mengurangi risiko kerentanan terhadap bencana 3. Meningkatnya kesiapsiagaan Pengurus LKS LU dalam menghadapi bencana 4. Adanya pemetaan jalur evakuasi 	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan BPBD, TAGANA 2. Bekerja sama dengan Karang Taruna dalam pembentukan jalur evakuasi 3. Membuat prosedur atau langkah-langkah mitigasi 	<p>Strategi WO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan simulasi bencana kepada Seluruh Pengurus LKS LU termasuk yang Lansia
<p>Threat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok siaga yang dibentuk tidak berjalan aktif 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendampingan secara berkelanjutan 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jalur evakuasi yang mudah diakses oleh para Lansia 2. Melibatkan warga setempat ke dalam kelompok siaga bencana

i. Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan

Berikut jadwal dan langkah-langkah kegiatan program yang akan dilakukan nantinya :

1. Pra pelaksana
 - 1) Praktikan membentuk tim Panitia pelaksanaan Program
 - 2) Praktikan bersama panitia membuat surat-surat untuk keperluan administrasi
 - 3) Praktikan bersama panitia membuat rancangan kegiatan
 - 4) Praktikan mengundang Badan Penanggulangan Bencana, TAGANA, Ketua Yayasan LKSU Faku Raqabah, Kelurahan Rancabolang
2. Pelaksanaan
 - 1) Sambutan oleh Ketua Yayasan LKSU Faku Raqabah
 - 2) Sambutan oleh Lurah Rancabolang
 - 3) Pembacaan Doa oleh Praktikan
 - 4) Pemberian arahan Oleh Pekerja Sosial sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan
 - 5) Pemberian materi terkait Bencana Gempa Bumi
 - 6) Pemberian Materi terkait Mitigasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi
 - 7) Pemetaan Jalur Evakuasi
 - 8) Simulasi Bencana Gempa Bumi
 - 9) Pembentukan Siaga Bencana
 - 10) Penutup
3. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Pendampingan
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Dokumentasi Sebagai Bukti Kegiatan

Tabel 20. Jadwal dan Langkah Analisis Penanggulangan Bencana

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	08.00 - 08.15	Sambutan 1	Sie. Humas	Sambutan Oleh Ketua Yayasan LKS LU Faku Raqabah
2.	08.15 - 08.30	Sambutan 2	Sie. Humas	Sambutan Oleh Lurah Rancabolang
3.	08.45 - 09.00	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pembacaan Doa Oleh Praktikan
4.	09.00 - 09.15	Pemberian Arahan	Sie. Acara	Pemberian arahan serta penyampaian maksud dan tujuan Pemandu : Pekerja Sosial
5.	09.00 - 09.45	Pemberian Materi 1	Sie. Acara	Materi :Bencana Gempa Bumi Pemateri : BPBD Kota Bandung
6.	10.00 - 12.00	Pemberian Materi 2	Sie. Acara	Materi : Mitigasi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Pemateri :BPBD Kota Bandung
7.	12.00 - 12.45	ISHOMA	Sie. Konsumsi	-
8.	12.00 - 13.00	Pemetaan Jalur Evakuasi	Sie. Acara	Pemetaan Jalur Evakuasi Pemandu :TAGANA
9.	13.15 - 14.00	Simulasi Bencana	Sie. Acara	Pemandu : TAGANA
10.	14.00 – 14.45	Pembentukan Tim Siaga Bencana	Sie. Acara	Pembentukan Tim Siaga Bencana di LKSU Faku Raqabah Pemandu : Pekerja Sosial
11.	14.45 - 15.00	Penutup	Sie. Acara	-

MATRIKS PROFIL

Tabel 21. Matriks Profil

No	Profil	Isu Masalah	Nama Program	Bentuk Kegiatan	Tujuan Program	Pihak yang terlibat
1	Jaminan Sosial	Peserta JKN di RW 10 merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan	Sosialisasi Fungsi dan Peran Petugas BPJS Kesehatan	Memberikan pengetahuan kepada Peserta JKN di RW 10 terkait Fungsi dan Peran Petugas BPJS Kesehatan	Terbentuknya program yang dapat merespon keluhan dari Peserta JKN yang ada di RW 10, serta memperkenalkan Petugas BPJS Kesehatan kepada Peserta JKN dalam bentuk kegiatan sosialisasi	Petugas BPJS Kesehatan, Pekerja Sosial, Perangkat RW 10, dan Kelurahan Rancabolang
2	Sumber Dana Bantuan Sosial	Belum terjalinnya kemitraan antara Yayasan Sedekah Masjid dengan CSR Perusahaan	Sosialisasi Peningkatan Kerjasama Kemitraan	Memberikan pengetahuan kepada Pengurus Yayasan Sedekah Masjid terkait dengan mekanisme menjalin hubungan kemitraan dengan stakeholder terkait, khususnya CSR Perusahaan	Meningkatkan strategi kemitraan antara Yayasan Sedekah Masjid dengan Stakeholder terkait, khususnya dengan CSR Perusahaan	Fundraiser, dan Pekerja Sosial,
3	Pemberdayaan Sosial	Belum diterapkannya Program Buruan SAE oleh Pengurus PKK di RW 01	Pelatihan Peningkatan SDM	Pelatihan serta bimbingan kepada Pengurus PKK RW 01 terkait dengan mekanisme Pengelolaan Lahan Buruan SAE	Meningkatkan kualitas SDM Pengurus PKK RW 01 serta merealisasikan pelaksanaan Program Buruan SAE di wilayah RW 01	DISPANGTAN Kota Bandung, Kelurahan Rancabolang, dan Pekerja sosial
4	Penataan Lingkungan Sosial	Tidak meratanya fasilitas air bersih di RW 01	Sosialisasi dan Pelatihan pembuatan teknologi filter air yang praktis	Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada warga RW 01 tentang teknologi filter air yang praktis untuk digunakan serta pelatihan pembuatan teknologi filter air	Memberikan inovasi dan wawasan baru kepada warga serta meningkatkan akses penggunaan air bersih secara merata di wilayah RW 01	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Tenaga Ahli, dan Pekerja Sosial

No	Profil	Isu masalah	Nama Program	Bentuk Kegiatan	Tujuan Program	Pihak yang terlibat
5.	Penanggulangan Bencana	Manajemen risiko penanggulangan bencana oleh Pengurus LKS LU Faku Raqabah masih rendah	Peningkatan Manajemen Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Kepada Pengurus LKS LU Faku Raqabah	Memberikan pengetahuan tentang penanggulangan bencana, memberikan pelatihan mitigasi dengan cara simulasi bencana, membentuk jalur evakuasi dan membentuk tim siaga bencana di LKS LU Faku Raqabah	Meningkatkan kesiapsiagaan Pengurus LKS LU Faku Raqabah dalam meminimalisir risiko tertimpa nya bencana gempa bumi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung, TAGANA, dan Pekerja Sosial

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah terlaksana yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Sosial. Dan dari kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktek dengan pengumpulan data melalui data sekunder. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan saat mencari data terkait isu-isu profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

1. Analisis Jaminan Sosial

Dalam profil analisis jaminan sosial, praktikan memilih isu mengenai Peserta JKN di RW 10 Kelurahan Rancabolang merasa kurang puas terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Permasalahan ini disebabkan karena pelayanan yang dinilai kurang optimal, dan sejauh ini Peserta JKN belum mengetahui bahwa adanya petugas BPJS Kesehatan yang dapat membantu dalam pelayanan. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui Program Sosialisasi Peran dan Fungsi Petugas BPJS Kesehatan dalam Merespon Keluhan Peserta JKN di RW 10.

2. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam profil analisis sumber dana bantuan sosial, praktikan memilih isu mengenai Belum terjalinnya kemitraan antara Pihak Yayasan Sedekah Majid dengan CSR Perusahaan. Permasalahan ini disebabkan karena Pihak Yayasan Sedekah Masjid tidak memiliki akses dalam menjangkau CSR Perusahaan. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui Program Sosialisasi Peningkatan Kerjasama Kemitraan

3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Dalam profil analisis pemberdayaan sosial, praktikan memilih isu mengenai Belum diterapkannya Program Buruan SAE oleh Pengurus PKK RW 01. Permasalahan ini disebabkan karena adanya keterbatasan modal untuk belanja kebutuhan awal, dan Kualitas SDM PKK RW 01 belum memadai. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas kepada Pengurus PKK RW 01 dalam mengelola lahan Buruan SAE.

4. Analisis Penataan Lingkungan

Dalam profil analisis penataan lingkungan, praktikan memilih isu mengenai belum meratanya fasilitas air bersih di wilayah rw 01. Permasalahan ini disebabkan karena Fasilitas air bersih yang ada merupakan bagian dari bantuan pemerintah

daerah sebelumnya. Dan bukan pembangunan secara mandiri. Dalam upaya memecahkan masalah ini praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Teknologi Filter Air yang praktis.

5. Analisis Penanggulangan Bencana

Dalam profil analisis penanggulangan bencana, praktikan memilih isu mengenai Manajemen Penanggulangan Bencana Oleh Pengurus LKS LU Fakku Raqabah masih rendah. Permasalahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan Pengurus LKS LU Fakku Raqabah terkait dengan Penanggulangan Bencana. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program Peningkatan Manajemen Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Kepada Pengurus LKS LU Fakku Raqabah

Secara garis besar manfaat lain yang mahasiswa dapatkan dari kegiatan Praktikum ini yaitu kemampuan menganalisis yang dimiliki mahasiswa meningkat. Mahasiswa mendapat pengetahuan-pengetahuan baru terkait profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang belum dapat di dapatkan di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam dan luas tentang dunia kerja dalam Pekerja Sosial. Sehingga mahasiswa menjadi semakin termotivasi dan yakin akan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi Pekerja Sosial yang dimiliki.

B. Rekomendasi

Rekomendasi praktikan dalam pelaksanaan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial:

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
 - a. Adanya sistem monitoring dan evaluasi kepada dosen pembimbing dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam membimbing.
 - b. Adanya alokasi dana untuk menunjang kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum laboratorium di lapangan.
 - c. Adanya standar pedoman praktikum yang tetap sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi mahasiswa.
 - d. Terbukanya akses referensi berbagai sumber bacaan yang dimiliki oleh Prodi untuk mahasiswa.
2. Rekomendasi praktikan untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
 - a. Mendukung kegiatan praktikum laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial secara finansial.
 - b. Meningkatkan sinergi dengan Prodi perlindungan dan pemberdayaan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Petugas BPJS Kesehatan SIAP Bantu Peserta JKN-KIS di Rumah Sakit* . (2022, Juni 04). Diambil kembali dari BPJS Kesehatan: <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2309/Petugas-BPJS-SATU-Siap-Bantu-Peserta-JKN-KIS-di-Rumah-Sakit>
- Isbandi, Rukminto Adi. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Grafindo Persada).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. (2017). *Panduan Pengelolaan Dana Sosial*. Semarang: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Bernthal, M. J., & Wellman, N. (2019). *Effective fundraising for nonprofits: Real-world strategies that work*. John Wiley & Sons.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- BNPB. (2019). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2020-2030*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Yulianti, R. (2019). Pembelajaran Mitigasi Bencana Gempa Bumi Melalui Buku Cerita Interaktif Berbasis Android Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 5(2), 139-146.
- Sumber Lain :
- UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
 - Perpres No. 82 tahun 2018, Pasal 16 ayat (1) tentang Jaminan Kesehatan
 - Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial
 - Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

LAMPIRAN

Lampiran 1.

RESUME PEMBEKALAN PROFIL ANALIS JAMINAN SOSIAL

Pemateri : Gayatri WaditraNirwesti, S.Mn, MSE

Instansi : Bappenas RI

Hari/tanggal : Kamis, 2 Februari 2023

A. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia

Landasan Filosofis Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia

1. Hak konstitusional : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3))
2. Setiap orang berkembang secara utuh :Memungkinkan setiap orang mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. (UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3))
3. Wujud tanggung jawab negara :Terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal (3))
4. Asas kemanusiaan dan martabat manusia : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2))

B. Program Jaminan Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Skema Penerima Bantuan Iuran (Non-Contributory)	Skema Non-Penerima Bantuan Iuran (Contributory)
Diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak	Dibedakan menjadi: Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).
Iuran dibayarkan oleh Pemerintah	Iuran bagi PPU ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja dan dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja.
Bagi peserta yang sudah tidak menjadi fakir miskin dan sudah mampu wajib menjadi peserta jaminan Kesehatan dengan membayar iuran (contributory	Iuran bagi PBPU dan BP dibayarkan secara mandiri oleh pekerja.

Berikut program jaminan sosial yang ada di Indonesia :

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
3. Jaminan Kematian (JKM) :Manfaat berupa biaya pemakaman, santunan sekaligus, santunan berkala, dan beasiswa pendidikan anak yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
4. Jaminan Hari Tua (JHT) : Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Besar manfaat yaitu seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya.
5. Jaminan Pensiun (JP) : Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia
6. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) : Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

C. Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia :

- a. Regulator: Penyusunan kebijakan dan program, meliputi : Kemenkes, Kemensos, Bappenas, Kemenkeu, Kemenko PMK dan Kemenaker
- b. Operator: Badan Penyelenggara, meliputi : BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Fasilitas Kesehatan : Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta
- d. Pengawasan :DJSN, dan Pemerintah Daerah

D. Kompleksitas Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan Jaminan Sosial:

1. Regulator : Koordinasi antar pemangku kepentingan: KL Pusat, BPJS, Pemda. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran: BPJS memiliki perencanaan dan penganggaran yang terpisah dari Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemenkeu). Pengawasan: DJSN vs Dewas BPJS
2. Badan Penyelenggara : Koordinasi manfaat antar Bapel: BPJS Kesehatan, BPJS TK, PT Taspen, PT ASABRI, dan Asuransi Swasta lainnya. Koordinasi dan hubungan

dengan faskes: kemitraan, BPJS tidak dapat memaksa faskes swasta untuk bekerjasama. Pelaporan pelaksanaan program: Presiden, Dewas, Pengawas Eksternal (DJSN, OJK, BPK).

3. Fasilitas Kesehatan : Rujukan berjenjang antar faskes: FKTP, FKRTL. Pelaporan faskes: BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan
4. Peserta : Pendaftaran peserta/Badan Usaha kepada BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan. Pelaporan perubahan data: administrasi – Dukcapil, kepesertaan – BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan. Pengajuan klaim atau komplain kepada BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan.

E. Potensi Kontribusi Lulusan Jaminan Sosial

Institusi/ Lembaga	Fungsi dan Profesi
Regulator ditingkat Pusat (misalnya Kemensos, Kemenko PMK, Kemendes, dll)	Analisis, penyusunan regulasi, desain kebijakan
Pemerintah Daerah/ Dinas (Dinsos, Bappeda, Disnaker, Dinkes, dll)	Perbaikan teknis program
Badan Penyelenggara (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan)	Strategi perluasan dan pelaksanaan program Pelaksanaan program
Provider (Perusahaan, Rumah Sakit)	Pemberdayaan dan pendampingan sosial
Lembaga Riset/ Pendidikan	Konsultasi jaminan sosial
Program Pembangunan (Pilot program, mitra pembangunan, program pemda)	Advokasi dan sosialisasi program

Lampiran 2.

RESUME PEMBEKALAN PROFIL ANALIS SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL

Pemateri : Tonton Hariyanto
Instansi : CSR Manager PT. AAPC Indonesia
Hari/tanggal : 22 Februari 2023

Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Tiga masalah yang dialami organisasi nirlaba, yaitu :

1. Sumber dana
2. Sumber daya manusia
3. Pengelolaan keuangan

Lima Dimensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

1. People
2. Property
3. Peace
4. Partnership
5. Planet

Kemitraan

Kemitraan tidak diartikan sekedar Kerjasama, tetapi dipandang memiliki nilai strategis dalam manajemen organisasi untuk mewujudkan keberlanjutan organisasi itu sendiri. Mitra tidak hanya dilihat sebagai sumber ‘dana’ bantuan sosial, tetapi lebih luas dapat dijadikan sumber transfer pengetahuan, keterampilan, cara belajar dan budaya untuk pengembangan organisasi kita.

Masalah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Sosial (dengan mitra) :

1. Masalah Non Teknis:
 - 1) Kemitraan yang “tidak setara”
 - 2) Komunikasi dan Koordinasi, pemilihan diksi yang tidak tepat
 - 3) Kesenjangan pengetahuan
 - 4) Perbedaan kultur organisasi
 - 5) Insentif
2. Masalah Teknis:
 - 1) Rencana Anggaran dan Belanja
 - 2) Prosedur (Pencairan dan Pelaporan)

- 3) Keterlambatan proses pencairan dana, sangat mengganggu pelayanan yang sudah direncanakan
- 4) Pengawasan, terutama mengenai “cara”
- 5) Manajemen Sumber Dana Bantuan sosial
 - a. Membangun jaringan
 - b. Identifikasi kebutuhan internal organisasi
 - c. Merumuskan komponen untuk kerjasama
 - d. Memetakan dan menetapkan sasaran
 - e. Pengorganisasian
 - f. Monitoring dan Evaluasi

Komponen dalam Membangun Jaringan

1. Efektifitas dan Efisiensi
2. Jaminan keberhasilan kerjasama, tidak meragukan
3. Mempertimbangkan resiko dan keuntungan
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan organisasi
5. Fokus pada orientasi manfaat sosial
6. Pertimbangan keberlanjutan dan pengembangan program

Tips Penggalangan Dana Dana Bantuan Sosial

1. Identifikasi sumber dana bantuan
2. Pertimbangkan peluang dan resiko
3. Kreatif dalam penggalangan dana :
 - a. Sistem donasi yang sederhana
 - b. Tidak membebani donatur (pelajari kebiasaan/culture calon donatur)
 - c. Menyelenggarakan event yang unik
 - d. Penghargaan
4. Social Media, hanya untuk komunikasi hasil dan perangsang donatur baru

Kompetensi yang harus dimiliki :

1. Open Minded
2. Adaptive: work with corporate/donor for community
3. Observation Skill
4. Focus as a Social Worker
5. Establishing Partnership
6. Communication Skill
7. Critical Thinking
8. Leadership

Lampiran 3.

RESUME PEMBEKALAN PROFIL ANALIS PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pemateri : Samsul Maarif
Instansi : Yayasan Usaha Mulia Cianjur
Hari/tanggal : 8 Maret 2023

A. Praktik Pemberdayaan Sosial dan Permasalahannya

Pemberdayaan sosial adalah Upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU No. 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial). Pemberdayaan sosial sebagai upaya untuk mencapai expected condition.

B. Inti dari suatu pemberdayaan adalah :

- a. Proses memperbaiki (to improve) kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help the community to help themselves bisa diwujudkan.
- c. Proses pembangunan yang berkesinambungan, yang berarti dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi (follow-up activity and evaluation).
- d. Menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama (group action) di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pendekatan-pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat :

5. Pendekatan direktif (Instruktif), dalam pendekatan ini cw sudah tahu apa yang baik dan dibutuhkan masyarakat, parakarsa & keputusan ada di tangan cw, hasil yang didapat lebih bersifat fisik & jangka pendek, kurang pengalaman belajar bagi masyarakat & ketergantungan terhadap cw
6. Pendekatan non direktif (Partisipatif), dalam pendekatan ini Masyarakat sudah tahu apa yang baik dan dibutuhkan, Masyarakat melakukan Analisa & membuat keputusan, CW sebagai katalisator & enabler, CW mendorong masyarakat untuk *self determination*.

B. Aktor-Aktor dalam Program Pemberdayaan

1. Pemerintah
2. NGO
3. Sektor swasta
4. Individu
5. Masyarakat itu sendiri

C. Bentuk-bentuk kegiatan Pemberdayaan :

1. Direct service
2. Linking
3. Capacity building
4. accesibility

D. Permasalahan & Solusi Dalam Pemberdayaan

1. Komunikasi dan koordinasi

solusinya :

- a. pertemuan rutin
- b. monitoring
- c. membuat media komunikasi bersama , seperti whatsapp group

2. Kurangnya informasi

solusinya :

- a. mengumpulkan informasi terkait
- b. sampaikan informasi secara jelas dan detil
- c. persepsi dan pemahaman

3. Kurangnya komitmen dari masyarakat

solusinya :

- a. kesepakatan
- b. surat kesediaan
- c. ruang partisipasi
- d. penghargaan

4. Nilai di masyarakat yang kurang mendukung

solusinya :

- a. kegiatan raising awareness
- b. pendekatan persuasif
- c. bermitra dengan tokoh keagamaan atau tokoh masyarakat

5. Exit strategy and sustainability

solusinya :

- a. memvbangun mineset dan komitmen masyarakat
- b. capacity building untuk masyarakat
- c. advokasi kepada stakeholder setempat
- d. perencanaan exit strategy dari awal
- e. memastikan tujuan awal tercapai dan berkelanjutan\

6. Birokrasi yang tidak mendukung

solusinya :

- a. kontak beberapa stakeholder terkait
- b. menjelaskan pentingnyaprogram untuk stakeholder tersebut

Lampiran 4.

RESUME PEMBEKALAN PROFIL ANALIS PENATAAN LINGKUNGAN

Pemateri : Ade Reno Sudiarno, A.KS, MSW
Instansi : Deputy 1 ceo, Islamic Relief Indonesia
Hari/tanggal : 24 Maret 2023

A. Penataan Lingkungan Sosial

Lingkungan Sosial adalah Keadaan sosial dan fisik langsung tempat orang menjalani kehidupan atau sesuatu terjadi atau berkembang (Bernett & Casper, 2001). Semua kondisi di dunia yang mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk pertumbuhan dan Perkembangan atau proses kehidupan yang dapat dilihat juga sebagai pemberian lingkungan bagi generasi yang lain (Stroz, 1987). Masalah lingkungan adalah masalah social juga. Pekerja social semakin mengasumsikan pentingnya memasukkan isu-isu lingkungan dalam intervensi social. Keterkaitan yang dekat Kepada isu-isu ekologi relevan khususnya ketika menangani masyarakat rentan (Rocha, 2018)

Green social work keterhubungan antar orang, organisasi sosial, relasi antara orang dan flora/fauna dalam habitatnya, dan interaksi antara krisis sosial ekonomi dan lingkungan dan perilaku antar orang yang merusak keberfungsian manusia dan bumi.

B. Tujuan

Tujuan : mereformasi tekanan sosio-ekonomi dan politik yang telah merusak pada kualitas hidup populasi masyarakat miskin dan marjinal, menjamin perubahan dan transformasi social guna meningkatkan keberfungsian orang dan bumi hari ini dan masa depan serta meningkatkan tanggung jawab dan hak saling peduli dengan orang lain.

Tugas utama :

- 1) Menyelesaikan ketidaksamaan distribusi kekuasaan dan sumber daya
- 2) Eliminasi kemiskinan dan ketidaksamaan
- 3) Mempromosikan saling ketergantungan, solidaritas global
- 4) Menggunakan sumber daya alam yang terbatas untuk kemanfaatan semua orang
- 5) Melindungi flora dan fauna

B. Konteks Lingkungan di Indonesia

1. Negara kepulauan terbesar di dunia
2. Hutan Tropis terluas ketiga di dunia
3. Sumber Daya Alam adalah ekonomi nasional
4. Masalah sosial-ekonomi-lingkungan di Indonesia

5. Masalah lingkungan, meliputi : hutan rusak, eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan merusaknya, dampak perubahan iklim, konflik pemanfaatan sumber daya, dan sumber daya laut yang rusak
6. Masalah sosial ekonomi, meliputi : pasar tenaga kerja terbatas, ketimpangan gender, keterampilan kerja terbatas, akses terhadap keuangan rendah, dampak krisis ekonomi, infrastruktur tidak memadai, kesenjangan sosial, konflik sosial antar suku, akses terhadap pendidikan berkualitas terbatas, kemiskinan, dan kebijakan pelayanan publik yang terbatas.

C. Berdasarkan hasil survey terdapat 15 permasalahan utama di Kota Bandung :

- 1) Kemacetan lalu lintas
- 2) Sampah kota
- 3) Sulitnya lapangan pekerjaan
- 4) Kurangnya ketersediaan air bersih
- 5) Banjir
- 6) Stabilitas harga barang
- 7) Masalah perekonomian
- 8) Keamanan warga
- 9) Masalah bansos
- 10) Infrastruktur kota
- 11) Masalah lingkungan
- 12) Zonasi pendidikan
- 13) PKL
- 14) Keterjangkauan pendidikan
- 15) Tata kelola pemerintahan

D. Tahapan Kerja Bidang Penataan Lingkungan Sosial

1. Identifikasi masalah, dapat dilakukan dengan menggunakan pohon masalah dan diagram ikan
2. Perencanaan, menggunakan teori perubahan dan kerangka logis
3. Implementasi, meliputi pengembangan kapasitas masyarakat, pengorganisasian, pengembangan ekonomi, koalisi, dan aksi politik dan sosial
4. Evaluasi

E. Peran dan kompetensi yang dibutuhkan untuk Praktek Penataan Lingkungan Sosial :

1. Advocate
2. Initiator
3. Spoker respon

4. Organizer
5. Negotiator
6. Consultant
7. Mediator

Bidang/sector Pekerjaan bagi Pekerja Sosial dapat bersinergi dalam proses pengembangan berkelanjutan, yaitu pengurangan kemiskinan dan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal adalah prioritas ekonomi global. Ini mengintegrasikan keseimbangan: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

F. Peluang Kerja sektor Profit/Non-profit

1. Business Development Manager
2. Program Management
3. Advocacy Advisor
4. Conflict Resolution Advisor
5. Consultant
6. Government Relation Manager
7. CSR Manager
8. Monitoring, Evaluation, and Learning Manager

Lampiran 5.

RESUME PEMBEKALAN PROFIL ANALIS PENANGGULANGAN BENCANA

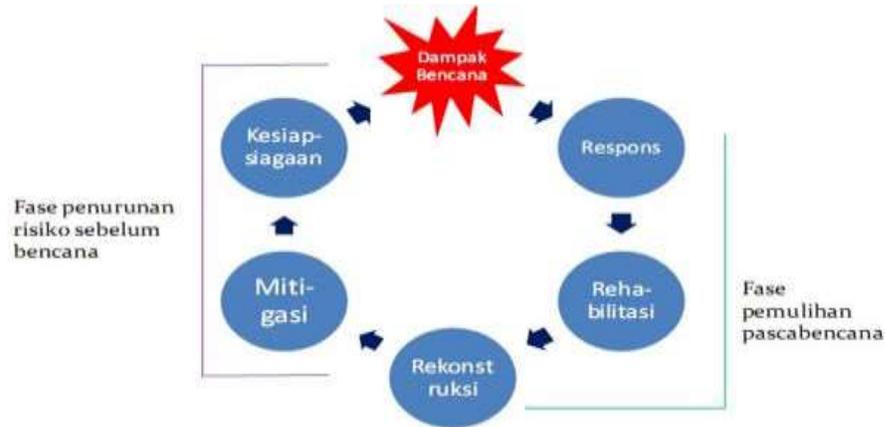
Pemateri : Mohd Robi Amri
Instansi : BNPB
Hari/tanggal : 5 April 2023

A. Membangun Sinergitas dalam Penanggulangan Bencana

Bencana terjadi apabila terjadi pertemuan antara bahaya dan kerentanan sehingga menimbulkan suatu resiko bencana yang dapat memicu terjadinya suatu bencana..

Indonesia setidaknya memiliki 10 potensi/risiko bencana diantaranya : banjir, banjir bandang, longsir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran lahan dan hutan, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonik utama yang aktif yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia. Proses tektonik aktif tersebut menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunungapi.

Berikut gambaran siklus bencana :



Penyelenggaraan penanggulangan bencana :

1. Prabencana
 - a. Siklus tidak ada bencana, adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah : perencanaan, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang
 - b. Siklus apabila terdapat potensi bencana, adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah : mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan.
2. Saat tanggap darurat
Adapun kegiatan yang dapat dilakukan ketika tanggap darurat adalah : keji cepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan.
3. Pasca bencana
 - a. Rehabilitasi, meliputi rehabilitasi saraba dan prasarana, sosial, ekonomi, kesehatan
 - b. Rekonstruksi lingkungan

B. Tantangan dalam penanggulangan bencana

1. Pra bencana, rendahnya kesadaran masyarakat dan para pihak dalam pemahaman manajemen risiko bencanaàkenali – hindari – kurangi – antisipasi
2. Saat bencana, Optimalisasi kesiapan sarpras dan pemahaman SDM dalam manajemen kedaruratanàsafe more lives and livelihood
3. Pasca bencana, Keterbatasan sumberdaya pemulihanàbuild back better and safer

Lampiran 6.

No.	Hari/tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kamis, 02 Februari 2023	Pembekalan profil analisis jaminan sosial	
2.	Kamis, 02 Februari 2023	Bimbingan pertama oleh dosen pembimbing	
3.	Rabu, 08 Februari 2023	Pelepasan mahasiswa praktikum laboratorium	
4.	Rabu, 08 Februari 2023	Penyerahan mahasiswa praktikum di Kecamatan Gedebage	
5.	Kamis, 09 Februari 2023	Penyambutan mahasiswa praktikum di Kelurahan Rancabolang	

No.	Hari/tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
6.	Jumat, 10 Februari 2023	Bersih-bersih masjid Al-Jabbar	
7.	Jumat, 10 Februari 2023	Wawancara bersama dengan ketua RW 10	
8.	Kamis, 16 Februari 2023	Kegiatan posyandu di RW 06	
9.	Rabu, 22 Februari 2023	Bimbingan kedua	
10.	Kamis, 09 Februari 2023	Penyambutan mahasiswa praktikum di Kelurahan Rancabolang	

No.	Hari/tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
11.	Kamis, 23 Februari 2023	Pembagian Kupon bersama dengan Yasayan Budha Suci	
12.	Kamis, 23 Februari 2023	Menulis kupon Budha Suci bersama Karang Taruna Kelurahan Rancabolang	
13.	Rabu , 01 Maret 2023	Kegiatan Supervisi di Kelurahan Rancabolang	
14.	Rabu, 08 Maret 2023	Bimbingan ketiga	
15.	Rabu , 08 Maret 2023	Pembekalan Profil Pemberdayaan Sosisal	

No.	Hari/tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
16.	Jumat, 10 Maret 2023	Wawancara dengan ketua RW 10	
17.	Rabu, 15 Maret 2023	Wawancara dengan Ketua PKK RW 01	
18.	Jumat , 31 Maret 2023	Kegiatan Supervisi Lembaga	
19.	Rabu, 05 April 2023	Pembekalan Profil Penanggulangan Bencana	
20.	Kamis , 06 April 2023	Wawancara dengan Ketua Pengurus LKS LU Faku Raqabah	

No.	Hari/tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
21.	Jumat, 14 April	Lokakarya di Kantor Kelurahan Rancabolang	